

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam evolusi peradaban manusia, kaum perempuan secara kultural dan historis cenderung diposisikan sebagai kelompok yang harus dijauhi dari panggung politik. Misalnya saja pada zaman Yunani kuno atau Kekaisaran Romawi, kehidupan politik dianggap tidak cocok bagi kaum perempuan. Namun untuk konteks sekarang tentu saja persepsi ini sudah banyak mengalami perubahan.¹

Kemodernan dan arus globalisasi sangat gencar mengepakan sayapnya ke seluruh negara belahan dunia. Hal ini mengantarkan perubahan pola pikir dalam diri perempuan dunia. Seperti yang sering diberitakan, agama mendominasi hampir segala aspek kehidupan di timur-tengah, yang menyulitkan bagi perempuan untuk menanyakan hak-hak mereka. Tetapi kini, hak politik bagi semua golongan di negara-negara tersebut sudah banyak mengalami perkembangan. Ada beberapa negara yang kini membuka ruang bagi perempuan untuk menjalankan hak politiknya. Antara lain seperti Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab dan yang belum lama ini adalah Kuwait. Keberhasilan kaum perempuan ini sekali lagi atas kemauan dan dari pola pikir perempuan-perempuan yang modern sehingga tuntutan hak politik mereka dapat terwujud.

¹ Daan Dini Khairunida, *Jalan Menuju Kemerdekaan Pengalaman Perempuan Kuwait*, dikutip tanggal 15 Oktober 2007, dari: <http://www.rahima.or.id/SR/19-06/Teropong.htm>

Tahun 2005, Pemerintahan konservatif Kuwait memutuskan untuk memberi perempuan hak politik penuh. Dewan Menteri sepakat meloloskan undang-undang yang memberi hak politik penuh kepada perempuan, seperti hak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk bersaing menjadi salah satu dari 50 anggota parlemen.² Sebelum UU pemilihan umum di rubah, perempuan Kuwait tidak bisa memilih atau dipilih walaupun mereka bisa menjadi diplomat, pengusaha dan bekerja di berbagai bidang industri. Hal ini memicu perempuan Kuwait mempertanyakan haknya yang hilang, sehingga mereka memutuskan akan berusaha menuntut hak mereka sampai parlemen memutuskan untuk memberi hak politik bagi perempuan.

Berbagai unjuk rasa, debat, banyak dilakukan oleh beberapa kelompok kepentingan dan para aktivis di Kuwait. Seperti penulis Fatima al-Baker yang tergabung dalam Asosiasi Persatuan Perempuan Kuwait, Nabil al-Mufarreh sebagai ketua Persatuan Nasional Pelajar Kuwait yang juga turut andil dalam kampanye menjelang pemilu 2006, yang mendukung penuh para calon legislatif perempuan.

Tuntutan kaum perempuan Kuwait selalu mendapat penentangan dari kaum konservatif Islam di Parlemen yang jumlahnya tidak sedikit. Kaum konservatif tidak menyetujui perempuan ikut aktif dalam kegiatan politik, karena bertentangan dengan tradisi budaya dan “penafsiran agama” yang telah lama berlaku di negara Kuwait. Maka tidak mengherankan bila

² *Kisah Dari Kuwait*, dikutip tanggal 15 Oktober 2007, dari: http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=522

parlemen Kuwait telah dua kali menolak usulan pembahasan kebijakan beberapa tahun sebelum undang-undang hak politik bagi perempuan disahkan.

Sejak tahun 1962, Kuwait telah melaksanakan 11 kali pemilihan parlemen, tetapi tidak pernah melibatkan perempuan. Melalui hasil amandemen konstitusi tahun 2005 lah akhirnya kaum perempuan Kuwait mendapatkan hak pilih dan dipilihnya.³ Pemerintahan konservatif Emirat Kuwait memutuskan untuk memberi perempuan hak politik penuh. Menurut Dewan Menteri, perubahan UU Pemilihan Umum Kuwait tahun 1962, sebagai bagian dari kebijakan “memperluas partisipasi masyarakat” dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan UU baru tersebut, perempuan dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Melihat dinamikanya perjuangan perempuan Kuwait, membuat penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “Berbagai Upaya Perjuangan Hak Politik Perempuan Kuwait Di Parlemen”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran bagaimana kegigihan perjuangan Kuwait dalam memperjuangkan hak politik yang berakhir dengan kemenangan dari kaum konservatif Islam di parlemen yang selama ini menentang.

³ Khairunida, *op.cit.*

2. Memberikan inspirasi dan membuka pola pikir perempuan dunia, yang apabila sampai saat ini hak politiknya masih terabaikan untuk segera diakui.
3. Memberikan sumbangan kajian Hubungan Internasional tentang hak politik perempuan.
4. Sebagai bentuk implementasi penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari penulis selama mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Sebagai upaya penulis untuk memenuhi persyaratan guna mendapat gelar kesarjanaan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 18 Mei 2005, Kuwait merubah Amandemen Undang-Undang Pemilu pasal I No.35 tahun 1962, yang sebelumnya Amandemen UU tersebut hanya memberikan hak politik bagi kaum lelaki saja tetapi kini UU tersebut telah dirubah dengan memberikan hak penuh bagi kaum perempuan untuk memberikan suara dalam pemilu ataupun mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Perubahan Amandemen UU ini berdasarkan keputusan parlemen Kuwait (*Majelis Al-ummah*). Sebanyak 35 suara mendukung, 23 menolak, dan 1 abstain dalam voting yang memperoleh penentangan keras dari anggota parlemen dari kubu Islamis dan konservatif.⁴

⁴ *Kuwait Tunjuk Wanita Sebagai Menteri*, dikutip tanggal. 7 November 2007, dari: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/13/int05.htm>

Ketika tahun 1999, Emir Kuwait saat itu adalah Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah sebenarnya juga telah mengajukan dekrit yang mendukung perempuan mendapat hak pilih, yang diajukan kerajaan tetapi ditolak oleh Majelis Nasional. Para anggota parlemen dari kalangan Islamis dan kesukuan menolak langkah Emir karena menurut mereka melanggar tradisi agama Islam dan masyarakat Kuwait. Begitulah kaum konservatif Islam selalu beralasan, bertentangan dengan tradisi budaya dan penafsiran agama yang telah lama berkembang di Kuwait. Selama enam tahun setelah dekrit itu gagal para kaum perempuan terus berjuang sampai parlemen meloloskan rancangan undang-undang yang menjamin hak politik bagi semua golongan.

Selama bertahun-tahun pula perempuan Kuwait berjuang untuk memperoleh hak politik penuh, namun upaya mereka selalu digagalkan oleh kubu muslim garis keras dan kelompok-kelompok suku didalam parlemen yang semuanya pria. Hal ini disebabkan karena dari kubu Islam yang berjumlah 18 (lebih dari sepertiga anggota parlemen yang berjumlah 50) ditambah dari kubu suku selalu menang dalam berbagai voting suara di parlemen. Maka setelah sidang maraton selama 10 jam, parlemen yang seluruh anggotanya laki-laki mengesahkan Amandemen UU tersebut dengan mayoritas besar. Setelah Amandemen UU itu disahkan, warga Kuwait menyambut gembira, mereka turun kejalan untuk merayakan kemenangan mereka. Orang-orang menari bergembira dan kembang api pun dinyalakan di langit malam Kuwait.

Pada tanggal 29 Juni 2006, Kuwait menyelenggarakan pemilu, untuk pertama kalinya kaum perempuan ikut berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Bukan hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai kandidat anggota parlemen. Dalam pemilu tersebut terdapat 253 kandidat, 28 di antaranya perempuan yang akan memperebutkan 50 kursi parlemen. Setelah satu tahun memenangi hak berpolitik, ke-28 perempuan itu akhirnya benar-benar terjun ke panggung politik. Para perempuan itu akan menghadapi banyak halangan mengingat tradisi Kuwait yang tidak mendukung ide kesetaraan peran perempuan dan laki-laki. Selain ke-28 perempuan yang mayoritas kandidat Independen, 50 kursi parlemen juga diperebutkan 60-70 kandidat dari oposisi, seperti kelompok islam, liberal, dan nasionalis. Di antara mereka terdapat 28 dari 29 anggota parlemen yang pernah mundur dari parlemen akibat konflik berkepanjangan di pemerintahan tentang masalah reformasi pemilu yang kemudian berakhir dengan pembubaran parlemen yang dilakukan oleh Emir Syeikh Sabah al-Ahmad al-Sabah karena muncul perselisihan antara pemerintah dan oposisi menyangkut reformasi pemilu.

Selama masa kampanye, berbagai organisasi dan kandidat Independen menyuarakan isu anti korupsi. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu kala itu lebih ramai dengan kandidat perempuan dan orang-orang muda yang belum berpengalaman dalam pemilu. Berbagai organisasi remaja 1 dibentuk untuk membantu kampanye kandidat muda.⁵

⁵ *Perempuan Kuwait Ikut Pemilu*, dikutip tanggal 18 Oktober 2007, <http://www.balitbangham.go.id/detail.php?ses=&id=123>

Setelah hasil penghitungan suara diumumkan calon-calon perempuan legislatif Kuwait gagal meraih kursi di parlemen dalam pemilu bersejarah di negara itu. Hasil penghitungan suara tersebut menunjukkan calon legislatif islamis dan eks anggota legislatif pro-reformasi menyapu bersih perolehan suara dan tak satu pun kursi untuk ke-28 calon legislatif perempuan. Padahal, populasi pemilih perempuan mencapai 57 persen dari total 340.000 orang pemilih sah. Kaum perempuan sebelumnya sudah menduga, kandidat islamis konservatif dan daerah bakal menjadi penghalang bagi kandidat-kandidat perempuan.

Hasil penghitungan suara menunjukkan, oposisi meraih hampir dua pertiga kursi. Kubu oposisi makin kuat dipersatukan dengan satu sikap menentang pemerintahan korup. Kemunculan kuat kubu oposisi memunculkan kemungkinan makin dalamnya ketegangan antara parlemen baru dan pemerintah. Sedangkan 20 dari 29 kandidat eks anggota legislatif terpilih kembali untuk Majelis Nasional kala itu. Mereka inilah yang membentuk poros aliansi oposisi.

Perjuangan Perempuan Kuwait yang tak kenal lelah itu merupakan suatu bukti bahwa mereka mampu membuktikan keadilan dinegaranya dan menjadi tauladan bagi kaum perempuan dunia yang apabila sampai saat ini masih belum mendapatkan hak politik.

D. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas tersebut, muncul pertanyaan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang dirumuskan dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Upaya Perempuan Kuwait dalam Memperjuangkan Hak Politik di Parlemen?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam melihat permasalahan diatas, setidaknya ada beberapa pemikiran, baik teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang muncul.

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Dan berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan.⁶ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau fenomena.⁷

Untuk menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Konsep Emansipasi

Konsep “emansipasi” sendiri sebenarnya adalah produk perjuangan sosial yang panjang. Dalam masyarakat Romawi kuno, emansipasi berarti pembebasan budak oleh sang tuan. Istilah itu kemudian mulai dipakai di

⁶ Mohtar Mas-oed. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 185

⁷ *Ibid*, hal. 93.

perancis pada abad ke-17 dengan arti sedikit berbeda, yaitu “pengalihan pemilikan”. Pada abad ke-19, “emansipasi” menjadi konsep yang populer di dalam perjuangan menentang perbudakan dan penghisapan terhadap suatu kelompok manusia.

Menurut Willem Frederik Wertheim, seorang ahli sosiolog dari Belanda, mengemukakan bahwa emansipasi bukanlah penganugerahan pembebasan dari atas kepada seseorang atau sekelompok orang, tetapi menurutnya emansipasi adalah hasil atau produk perjuangan kolektif dari kelompok atau kalangan yang tidak diuntungkan oleh sistem. Dan tidak membatasi pada perjuangan yang besar (nasional) dan mencapai perubahan sesuai keinginan. Justru setiap bentuk perlawanan kecil yang membebaskan diri dari belenggu, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia, adalah suatu hal yang menghidupi gerak emansipasi.

Menurut pengertian umum, emansipasi diartikan berdekatan dengan *evolusi*. Karenanya, proses evolusi manusia di zaman purba untuk sebagian besar adalah sama dengan emansipasi, pembebasan manusia dari cengkeraman alam sekelilingnya, adalah merupakan ungkapan yang terlampau umum mengatakan bahwa pada taraf perkembangan umat manusia sebelumnya, manusia itu sangat tergantung pada dan dikuasai oleh alam. Namun, emansipasi pada kekuatan-kekuatan alam hanya sebagian saja dapat dipandang sebagai suatu proses evolusioner.⁸

⁸ W.F. Wertheim, *Gelombang Pasang Emansipasi*, terjemahan oleh Ira Iramanto, Garba Budaya & ISAI (Institut Studi Arus Informasi) dengan dukungan KITLV, hal. 98.

Untuk dapat berlaku sebagai evolusi mestilah ditambahkan suatu dimensi baru kepada proses emansipasi itu: kebebasan itu tidak hanya suatu kebebasan dari cengkeraman lingkungan sekitarnya, melainkan juga kebebasan potensi-potensi kreatif manusia dari struktur-struktur masyarakat yang mencekik, teristimewa dari struktur-struktur yang mendorong umat manusia ke jalan kemusnahan.⁹

Tahapan-tahapan perkembangan emansipasi. *Pertama*, yaitu kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat merasakan dirinya dikebelakangkan secara hukum, ekonomi atau sosial, diasingkan dari fungsi-fungsi dan kedudukan-kedudukan tertentu, diasingkan dari keikutsertaan dalam bentuk-bentuk tertentu kehidupan kebudayaan dan sosial. *Kedua*, suatu minoritas dalam jumlah, dan secara politik dan ekonomi relatif tidak berdaya, maka terjadi pengunduran diri pada nilai-nilai kultural yang dirasakan sebagai milik kelompok itu sendiri; dalam pengunduran diri ke dalam suatu dunia sendiri itu juga diungkapkan suatu perlawanan terhadap nilai-nilai dominan dan struktur kekuasaan yang berlaku yang mendukung nilai-nilai itu. *Ketiga*, perjuangan emansipasi yang mengarah atas landasan yang universal pada pembebasan umat manusia sebagai suatu keutuhan, tujuan perjuangan itu menjadi suatu perubahan menyeluruh tatanan masyarakat.

Dengan melihat tahapan perkembangan emansipasi diatas, maka perjuangan perempuan Kuwait dalam memperjuangkan hak politik termasuk

⁹ *Ibid*, Hal. 99

dalam tahapan yang ke tiga. Dimana perjuangan perempuan Kuwait adalah perjuangan menuntut hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan bagi perempuan yang selama ini tidak pernah mendapatkan hak pilih dan dipilih.

2. Sistem Politik

Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang berkaitan dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.¹⁰ Sistem dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis.¹¹

Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait-mengkait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan.

Dalam perspektif sistem, politik adalah subsistem dari sistem sosial. perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari

¹⁰ Rusadi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 1999, hal. 3.

¹¹ *Ibid*

berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada. Kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik dan perilaku politik.¹²

Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi. Sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem politik melaksanakan perang atau mendorong usaha perdamaian; memajukan perdagangan internasional atau membatasinya; membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri; menarik pajak dari rakyat secara adil atau tidak; mengatur perilaku manusia dengan ketat atau kurang ketat; mengalokasikan sumber daya untuk bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan atau tidak; dan sebagainya.¹³

Untuk melakukan kegiatan ini sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur politik, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi

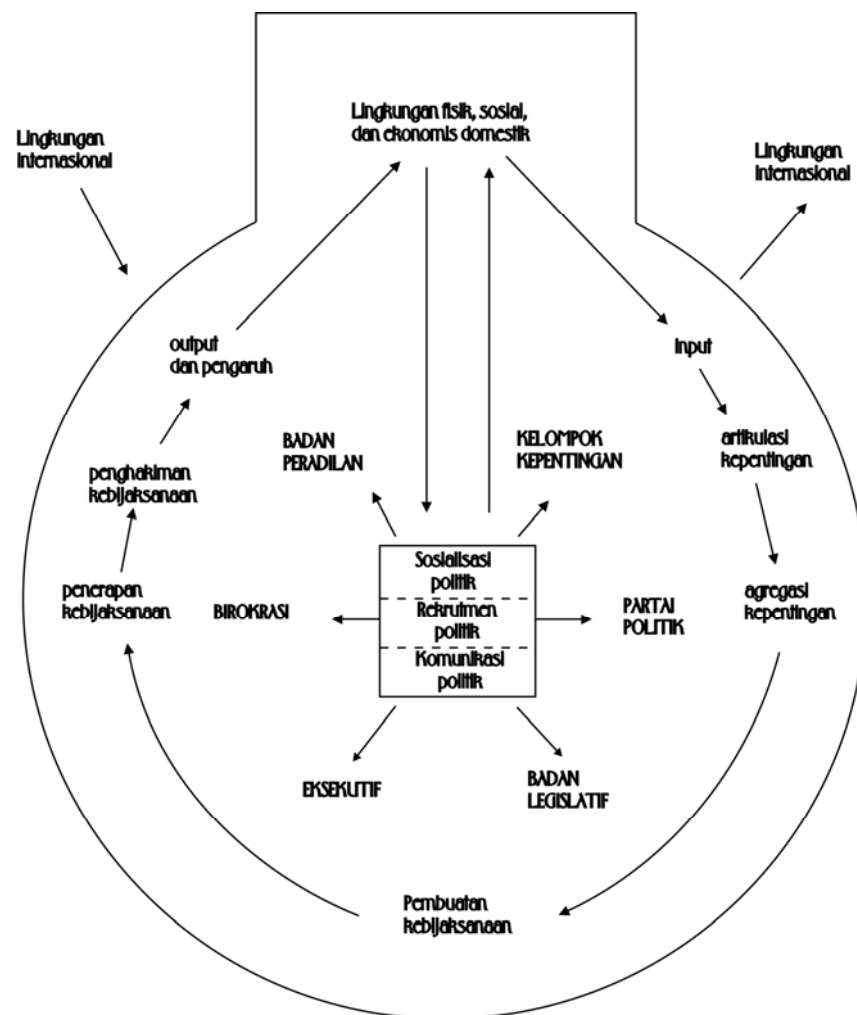
¹², *Politik*, dikutip tanggal 15 Oktober 2007 dari : <http://www.wikipedia.org>

¹³ Mohtar Mas' oed & Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 23-24.

tertentu, yang melanjutkan sistem politik itu untuk merumuskan melaksanakan kebijakan-kebijaksanaannya.¹⁴

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana kita menghubungkan struktur dengan fungsi, dan proses dengan kebijakan dan bekerjanya sistem.

Gambar 1
Sistem Politik: Struktur dan Fungsi Menurut Gabriel A. Almond



(Sumber: Mohtar Mas'ood & Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 28)

¹⁴ *Ibid*

Dari gambar di atas terdapat tiga fungsi politik, yakni *Sosialisasi politik*, yang terdapat dalam setiap sistem politik merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umumnya, atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, judisiil tertentu. Fungsi ini melibatkan keluarga, sekolah, media komunikasi, gereja, pekerjaan, dan berbagai struktur politik. *Rekrutmen politik (political recruitment)* merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. *Komunikasi politik*, merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada terdapat dalam setiap sistem politik.¹⁵

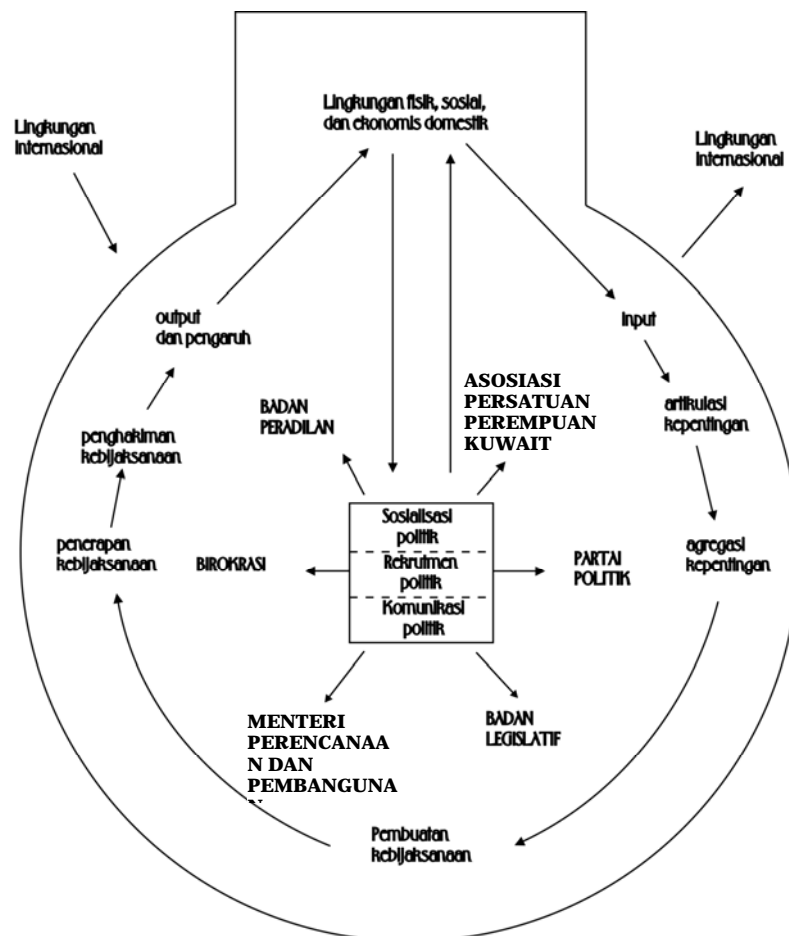
Di pinggir-pinggir lingkaran terdapat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tujuan-tujuan dapat ditetapkan, individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang ingin mereka dapatkan dari politik. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian harus digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan seperti peningkatan atau penurunan pajak, peningkatan atau pengurangan dana kesejahteraan sosial, dsb. Demikianlah, panah di pinggir kanan itu dari *artikulasi kepentingan* mengarah ke *agregasi*

¹⁵ Mohtar Mas' oed & Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 29.

atau penggabungan kepentingan. Selanjutnya alternatif-alternatif kebijaksanaan itu dipertimbangkan dan ditentukan pilihan. Keputusan ini harus dilaksanakan, dan bila keputusan ditentang atau diselewengkan maka harus ada proses *penyesuaian (adjudication)*.

Penerapan kebijaksanaan pemerintahan yang sering disebut “output”-nya sistem politik mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik melalui perpajakan, penyediaan jasa-jasa dan keuntungan, ataupun pengaturan perilaku.

Gambar 2
Aplikasi Teori Sistem Politik dengan Kelompok Kepentingan Perempuan Kuwait



Dengan menggunakan konsep di atas dapat digunakan dalam menjelaskan perjuangan kaum perempuan Kuwait yang dikategorikan sebagai kelompok kepentingan dalam percaturan sistem politik Kuwait. Seperti Kelompok Budaya, Sosial dan Perempuan, Persatuan Nasional Pelajar Kuwait dan Asosiasi Persatuan Perempuan Kuwait. Pada dasarnya kelompok-kelompok kepentingan ini memiliki tujuan yang sama yakni diakuinya hak politik mereka. Kemudian melalui artikulasi kepentingan mengarah pada penggabungan kepentingan-kepentingan (agregasi) dan tuntutan-tuntutan menjadi alternatif kebijaksanaan. Maka Pemerintah mengambil keputusan dengan memberikan hak pilih dan dipilih bagi perempuan Kuwait.

Pengaruh dari ketiga fungsi diatas yakni, kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Berangkat dari sistem pemerintahan yang terbentuk di negara Kuwait adalah sistem politik monarki konstitusional, yakni sebuah kerajaan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja sebagai kepala negara. Raja adalah sebagai ketua simbolis cabang eksekutif. Saat ini, monarki konstitusional digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Kekuasaan memerintah menjadi milik keluarga Sabah, yang memilih Emir diantara para anggota sendiri.¹⁶

¹⁶*Pemerintah Kuwait*, dikutip tanggal 18 Oktober 2007, dari:

<http://www.wikipedia.org>

Dalam konstitusi 11 November 1962, terdapat suatu Dewan nasional (*Majelis Al-Ummah*) yang terdiri atas 50 anggota, bertugas menyusun Undang-undang dan anggotanya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun oleh para warga negara sipil pria yang telah dewasa. Tetapi pada tahun 1985, badan legislatif ini dibubarkan akibat perselisihan tajam dengan pihak pemerintahan. Emir juga memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri. Kuwait tidak mengizinkan berdirinya partai hanya ada suatu kelompok-kelompok kepentingan politik bagi para calon yang akan berdiri dipangung politik dalam setiap pemilihan umum. Sistem tata hukum Kuwait menggunakan hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadits juga hukum adat tanpa bersandar pada KUHP. Sedangkan berbagai permasalahan keluarga seperti perceraian, warisan dan sebagainya. Diurus oleh pengadilan tradisi agama masing-masing. Misalnya Sunni, Syi'ah dan Kristen.

F. Hipotesa

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil hipotesa bahwa perempuan Kuwait memperjuangkan hak politik di parlemen, dengan melalui upaya:

1. Perjuangan pembentukan amandemen UU pemilu (Hak politik bagi semua golongan)
2. Aktifis perempuan mencari dukungan ke berbagai pihak
 - a. Dukungan dari direktur Institut Pembinaan perempuan Kuwait
 - b. Pendapat umum tentang perempuan dan emansipasi
3. Kampanye calon legislatif perempuan Kuwait

G. Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup suatu penelitian terhadap suatu masalah sangat diperlukan agar memperjelas hal-hal yang pokok dalam melihat permasalahan yang sebenarnya. Untuk membuat terarahnya pembahasan skripsi yang berjudul “Berbagai Upaya Perjuangan Hak Politik Perempuan Kuwait Di Parlemen”.

Untuk menghindari melebarnya penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu berawal dari tahun 1962, pertama kali negara Kuwait membentuk parlemen dan merupakan negara tertua yang memiliki parlemen di kawasan Teluk Persia. Sampai dengan tahun 2006 dimana perempuan Kuwait mendapat hak politik dan mulai terlibat dalam politik. Namun, tidak menutup kemungkinan digunakannya data-data tahun sebelumnya agar penelitian ini mendekati kesempurnaan.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi pustaka (library research) yang meliputi data-data yang bersumber pada buku-buku, majalah, surat kabar, maupun literatur-literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian, termasuk mengakses berbagai sumber data dari internet.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu terdiri dari :

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan hal-hal yang bersifat normatif dan juga aturan baku dalam penulisan skripsi, diantaranya yaitu Alasan pemilihan Judul yang berisi tentang mengapa hal tersebut dijadikan sebagai suatu permasalahan dalam judul skripsi yang akan ditulis; Tujuan Penulisan berisi tentang untuk apa sesuatu itu dibuat; Latar Belakang Masalah yaitu berisi gambaran masalah yang akan dijadikan penelitian dalam skripsi ini; Pokok permasalahan berisi tentang permasalahan apa yang akan dibahas; Kerangka dasar pemikiran yakni alat untuk menganalisa permasalahan yang berupa konsep-konsep yang relevan sehingga akan didapat jawaban yang valid; Hipotesa yaitu memuat jawaban umum dalam suatu penulisan skripsi; Jangkauan penulisan yaitu memuat waktu dari kapan sampai kapan masa yang akan dibahas; Metodologi Penulisan yaitu cara-cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta Sistematika Penulisan yaitu berisi tentang gambaran data-data yang akan dikembangkan dalam penulisan ini.

Bab II, Menggambarkan tentang sejarah perjuangan perempuan Kuwait dari kondisi umum perempuan Kuwait sebelum undang-undang hak politik bagi mereka disahkan dan pengaruh internasional terhadap gerakan perempuan Kuwait, khususnya Amerika Serikat.

Bab III, Mendeskripsikan perempuan Kuwait ketika tahun 2005 mulai terlibat dalam politik dan mengalami hambatan dari sikap penentangan kaum konservatif di parlemen.

Bab IV, Menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan perempuan Kuwait untuk dapat mencapai tujuan-tujuan mereka, mendapatkan hak politik sebagai pemilih atau kandidat dalam pemilu dan beberapa argumen dari berbagai pihak yang mendukung perjuangan perempuan Kuwait.

Bab V, Dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

SEJARAH PERJUANGAN PEREMPUAN KUWAIT DALAM POLITIK

Sejarah Kuwait bermula dari tahun 1740, ketika kota kecil Kuwait mulai dihuni oleh sejumlah suku Anizah, yang meninggalkan kehidupan nomaden di pedalaman Semenanjung Arab dan berpindah ke pantai Teluk Persia. Pada tahun 1756, rakyat Kuwait memilih emir pertama, Sabah I, pendahulu dari dinasti yang berkuasa sekarang. Karena merasa terancam oleh serbuan dari pedalaman Semenanjung Arab dan dari Turki, Kuwait mencari perlindungan kepada Inggris dan menjadi jajahannya dalam tahun 1899. Negeri ini melepaskan diri dari Inggris tahun 1961.

Gambar 3 Peta Kuwait



(Sumber : <http://www.wikipedia.org>)

Kuwait, merupakan sebuah negara kerajaan konstitusional di ujung Teluk Persia. Dari segi geografis, di sebelah barat dan utara Kuwait berbatasan dengan Irak, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia, dan sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Arab Saudi. Dari segi fisiografi, Kuwait mencakup wilayah seluas 17.818 km², termasuk sejumlah pulau lepas pantai (900 km²), yang semuanya tidak didiami, kecuali P. Faylakah.¹⁷ Di sebelah selatan daratan utama terletak bekas daerah netral seluas kira-kira 9.220 km², yang sejak tahun 1922 dikuasai secara bersama-sama oleh Kuwait dan Arab Saudi sampai daerah ini kemudian dibagi antara kedua negara tersebut pada tahun 1966.

Penduduk asli Kuwait adalah keturunan orang Anizah, yang pindah ke pantai Kuwait dari daerah pedalaman dalam abad ke-18.¹⁸ Bahasa Arab merupakan bahasa resmi, meskipun ada juga (termasuk warga negara Kuwait) yang memakai bahasa Persia sebagai bahasa utama. Selain itu, bahasa Inggris dikenal pula secara luas di kalangan orang Kuwait. Sebelum industri minyak memajukan ekonominya, sebagian besar penduduknya hidup mencari ikan, mencari mutiara, dan membuat perahu. Perahu Kuwait berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di Asia dan Afrika, dan para pelaut Kuwait terkenal di banyak negara. Kuwait sendiri merupakan daerah suku bangsa pengembara, dan baru dalam waktu 35 atau 40 tahun terakhir menarik penduduk membangun perkotaan. Pada mulanya, lebih dari separuh

¹⁷ *Geography*, dikutip tanggal 10 Desember 2007, dari: <http://countrystudies.us/Persian-gulf-states/18.htm>

¹⁸ *Kuwait Population*, dikutip tanggal 10 Desember 2007, dari: <http://countrystudies.us/Persian-gulf-states/19.htm>

penduduk negeri ini terpusat di kota Kuwait. Tetapi kini penyebaran penduduk sudah cukup merata di seluruh wilayah negara ini. Kota Kuwait sendiri telah meluas ke sepanjang pantai selatan, dan Mina-al-Ahmadi telah dikembangkan sebagai kota minyak. Pusat kedua kota ini beserta daerah pinggirannya sangat padat penduduknya. Kota-kota utama di negeri ini, selain kota Kuwait dan mina-al-Ahmadi, adalah As-Salimiyah (145.991) Jahra (67.311), dan Al-Farwaniyah (57.841).

Pendapatan yang sangat besar dari minyak telah membuat Kuwait menjadi negara yang sangat makmur dan maju di dunia Arab. Pemerintah menggunakan pendapatan dari minyak ini dalam jumlah luar biasa untuk kesejahteraan rakyat, sehingga Kuwait menjadi negara modern dengan ciri khasnya. Kemakmuran rakyat merata di negeri ini sehingga kemiskinan tidak dikenal. Sistem pendidikan di negeri ini cukup luas, dari sekolah perawat sampai universitas. Pendidikan diberikan secara cuma-cuma, termasuk fasilitas pendidikan untuk orang dewasa, sehingga angka bebas buta aksara di Kuwait termasuk yang paling tinggi di Timur-tengah. Wajib belajar dikenakan pada anak-anak yang berumur 6-14 tahun sejak tahun ajaran 1966/1967. Sekolah Tinggi Teknik dibuka tahun 1954, dan Universitas Kuwait didirikan tahun 1966.¹⁹ Maka tidak mengherankan apabila kaum perempuan rata-rata memiliki pendidikan yang tinggi sehingga banyak dari mereka yang bekerja sebagai pebisnis, diplomat dan

¹⁹ *Kuwait Education*, dikutip tanggal 10 Desember 2007, dari: <http://countrystudies.us/persian-gulf-states/19-Education.htm>

apapun pekerjaan laki-laki dapat dilakukan oleh perempuan. Namun, sejak Kuwait merdeka mereka tidak memiliki hak politik dalam pemilu, baik hak memilih maupun dipilih. Hal ini sangat disayangkan bagi negara kecil, modern, kaya raya seperti Kuwait tetapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terjadi di negeri ini. Satu hal ini, sangat tidak memuaskan bagi sebagian besar warga Kuwait. Sumber ketidakpuasan yang juga mungkin terjadi adalah orang-orang asing yang tinggal di Kuwait, seperti orang Palestina, Arab Saudi, Mesir, Irak, India, dan Pakistan, yang jumlahnya kurang lebih separuh dari jumlah seluruh penduduk atau 80 persen dari seluruh angkatan kerja. Di negara kecil ini mereka tidak diizinkan memiliki tanah atau ikut mengambil bagian dalam kehidupan politik.

Kuwait adalah negara Islam, kurang lebih 91,5% penduduk beragama Islam. Sebagian besar warganya termasuk aliran Sunni. Meskipun demikian, terdapat pula kelompok Kristen dalam jumlah kecil-kecil, seperti Protestan, Katolik Roma, Gereja Ortodoks, Gereja Suriah, dan Gereja Armenia. Dominan dekatnya hubungan sejarah masa silam negara-negara Arab, tidak mengherankan apabila kesamaan dan saling berpengaruh akan tradisi budaya Timur-tengah, sosial, geografis, ekonomi (sebagai sesama negara penghasil minyak), dan agama. Itulah mengapa negara kecil Kuwait memiliki citra diri yang kuat sebagai negara Islam, kaya raya dan modern dengan ciri khasnya.

A. Sistem Politik Kuwait

Kuwait adalah sebuah negara yang menganut sistem politik monarkhi konstitusional, yakni sebuah kerajaan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja sebagai kepala negara. Raja adalah sebagai ketua simbolis cabang eksekutif. Saat ini, monarkhi konstitusional digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi Raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Kekuasaan memerintah menjadi milik keluarga Sabah, yang memilih Emir diantara para anggota sendiri.²⁰

Dalam konstitusi 11 November 1962, terdapat suatu Dewan nasional (*Majelis Al-Ummah*) yang terdiri atas 50 anggota, bertugas menyusun undang-undang dan anggotanya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun oleh para warga negara sipil pria yang telah dewasa. Tetapi pada tahun 1985, badan legislatif ini dibubarkan akibat perselisihan tajam dengan pihak pemerintahan. Emir juga memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri. Kuwait tidak mengizinkan berdirinya partai hanya ada suatu kelompok-kelompok kepentingan politik bagi para calon yang akan berdiri dipanggung politik dalam setiap pemilihan umum. Sistem tata hukum Kuwait menggunakan hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadits juga hukum adat tanpa bersandar pada KUHP. Sedangkan berbagai permasalahan keluarga seperti perceraian, warisan dan sebagainya, diurus

²⁰ *Pemerintah Kuwait*, dikutip tanggal 18 Oktober 2007, dari: <http://www.wikipedia.org>

oleh pengadilan tradisi agama masing-masing. Misalnya Sunni, Syi'ah dan Kristen.

1. Politik Masa Awal Kemerdekaan

Pada abad ke 17, Bani Khalid menguasai bagian Timur negara Arab dan daerah kekuasaan mereka menjangkau dari Kuwait sampai ke Qatar. Pada tahun 1672, Barrak Bin Ghurair, Emir Bani Khalid, telah membangun sebuah *Kut* (yaitu sebuah rumah kecil yang berbentuk benteng yang terletak di dekat sungai) di Qarane. Sekelompok kecil masyarakat yang kehidupannya sebagai nelayan. Tempat ini berada di kota Kuwait yang sekarang terkenal sebagai *Wattiya* (sebutan lain dari *Kut*).

Utub, federasi dari keluarga-keluarga Arab, telah mengusir Al-Aflaj di pusat kota Arab di musim kemarau pada pertengahan abad ke 17. Di Qatar mereka telah mempelajari tentang ilmu kelautan dan kemudian menyebar ke berbagai pelabuhan Teluk Arab sebelum datang ke Kuwait pada awal abad ke-18. Dimana mereka menetap dengan mendapatkan izin resmi dan dibawah kekuasaan Raja Bani Khalid. Perselisihan-perselisihan kelompok mengenai keputusan Bani Khalid pada tahun 1722, yang telah memberikan *Utub* pada Kuwait, yaitu sebuah kesempatan untuk menjalankan kebebasan dan Kuwait pun mulai muncul sebagai kekuatan politik yang benar-benar nyata. Setelah tahun 1752, perselisihan internal berlanjut antara Bani khalid dan bangkitnya kelompok *Wahabi*, mereka adalah musuh-musuh yang harus diperhitungkan di pusat negara Arab, yang telah memberikan kemerdekaan *Utub* di Kuwait secara *de facto*.

Pada tahun 1756, mereka memilih Sabah Bin Jabir Bin Adhbi sebagai Emir Kuwait untuk mengelola masalah hukum dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota.²¹ Sebagai daerah yang dipimpin Bani Khalid dimana pengaruh kekuasaannya telah berkurang, kekurangan perlindungan negara Kuwait telah membut timbulnya kekuatan lokal yang perlu diperhitungkan. Tetapi peraturan Al-Sabah sangat bijaksana, Utub telah berubah dari pengembara/penghijrah sampai menetap sejak pemberangkatan dari Al-Aflaj dan untuk pertama kali Al-Sabah dipilih oleh kelompok-kelompok yang lain sebagai pemimpin mereka.

Anak laki-laki ke-5 Sabah yang bernama Abdallah (1762-1812) telah terpilih untuk melanjutkan kesuksesan ayahnya. Dibawah kepemimpinannya Kuwait berubah dari sebuah Sheikdom kecil menjadi negara yang benar-benar makmur dan bebas dan kemudian memasuki masa keemasan pertama pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai pelabuhan besar yang terkenal di beberapa rute perdagangan internasional.

Mutiara adalah satu-satunya hasil alam dari negara Kuwait, dan setiap tahunnya ribuan kapal-kapal mutiara dibuat untuk tempat-tempat penyimpanan mutiara yang menguntungkan dan nantinya akan dikeluarkan pada akhir musim panas. Pembuatan kapal menggunakan bahan-bahan import, yang menjadi sebuah industri yang sangat penting.

²¹*Government and politics*, Countrystudies, 2002, dikutip tanggal 10 Desember 2007, dari: <http://countrystudies.us/persian-gulf-states/26.htm>

Jaber pertama (1812-1859) telah mengatur perundingan dengan para pedagang/saudagar Kuwait dengan bijaksana, dan memutuskan untuk memelihara hubungan-hubungan baik dengan semua kekuatan-kekuatan besar pada saat itu. Bagaimanapun, Kuwait telah bebas merdeka dan berhasil/makmur pada abad ke-19, kemerdekaannya datang dibawah ancaman dari kekuatan-kekuatan daerah dan negara-negara Eropa.

2. Politik Masa Kemerdekaan Dibawah Perlindungan Inggris

Untuk mewujudkan dan menjawab keinginan orang-orang Turki, Sheikh Mubarak yang agung (1896-1915) telah menandatangani sebuah perjanjian dengan negara Inggris pada tahun 1999 yang menetapkan negara Kuwait sebagai “Negara merdeka dibawah perlindungan Inggris”.²² Inggris berjanji melindungi Sheikh Mubarak dan keturunannya, dan menyerahkan surat yang telah disepakati untuk menghindari perjanjian-perjanjian dengan pihak/kekuatan lain, tidak menerima wakil-wakil dari luar negeri dan tidak menyerahkan bagian dari wilayah Kuwait tanpa persetujuan Inggris.

Walaupun Sheikh Mubarak telah menaikkan pajak, namun hal yang demikian itu membuat dirinya tidak disukai oleh kalangan pedagang-pedagang lokal, namun peraturan yang ditetapkannya sangat menguntungkan negara. Ratusan orang tiba untuk menetap di Kuwait, karena tertarik oleh administrasi yang jelas dan aktifitas perdagangan yang meningkat. Tetapi penurunan perdagangan secara tajam di Kuwait dari tahun 1920an ke depan berpengaruh terhadap resesi dunia, peranan Kuwait

²² *Ibid*

berkurang sebagai anggota penting dalam rute perdagangan internasional pada abad ke-20 karena adanya peperangan-peperangan kecil diantara anggota-anggota suku Ikhwan yang berada di pedalaman Arab, yang akhirnya dapat dikalahkan pada tahun 1930.

3. Politik Masa Modern (Masa Setelah Pengesahan UU Hak Politik Perempuan)

Tahun 2005, Emir Kuwait Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah merombak sistem pemerintahan Kuwait dengan memisahkan jabatan perdana menteri dengan jabatan putra mahkota yang selama ini dirangkap. Sebelumnya, jabatan rangkap itu dipegang oleh Sheikh Saad al-Abdulla al-Sabah. Kini ia hanya menjabat putra mahkota sedangkan jabatan perdana menteri dipegang oleh Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah yang juga saudara laki-laki Emir.

Perdana Menteri Sheikh Sabah sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri. Jabatan ini diembannya sejak tahun 1963. Sedangkan Sheikh Saad memegang jabatan rangkap sejak tahun 1978. Sheikh Sabah, sepupu Sheikh Saad, telah menjadi penguasa *de facto* selama empat tahun ketika itu, karena buruknya kesehatan almarhum Emir dan Sheikh Saad. Parlemen memberikan surat bulat untuk mencopot Sheikh Saad tak lama sebelum menerima surat turun takhtanya.²³ Kondisi kesehatan Sheikh Saad telah memancing perdebatan di antara warga Kuwait mengenai kemungkinan suksesi.

²³ *Kuwait Selesaikan Krisis Pergantian Emir*, dikutip tanggal 5 Desember 2007, dari: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/26/ln/2391785.htm>

Tugas yang menanti Sheikh Sabah adalah segera membentuk pemerintahan baru. Kabinet lama dibubarkan, sehari setelah pemilihan umum legislatif berlangsung dimana sebagian besar kursi kelompok pro-liberal jatuh ke tangan kelompok konservatif. Keputusan mengenai pemisahan kekuasaan ini mengakhiri berbagai spekulasi mengenai masa depan pemerintahan Kuwait. Selama bertahun-tahun kelompok pro-liberal telah mendesak Emir Kuwait untuk melakukan pemisahan kekuasaan sesuai dengan perubahan zaman yang menuntut reformasi di bidang politik termasuk salah satunya memberikan hak pilih dan dipilih bagi kaum perempuan. Sheikh Sabah yang pro-liberal menilai, privatisasi maupun globalisasi penting bagi masa depan Kuwait. Ia juga menganggap penting perbaikan hubungan antara Kuwait dengan negara-negara Arab, meskipun negara-negara tersebut mendukung Irak ketika Irak menginvasi Kuwait dibulan Agustus 1990 dan menduduki negeri kecil itu selama tujuh bulan. Dengan jatuhnya rezim Saddam Hussein, Amerika Serikat mendesak negara-negara di Timur-Tengah untuk melakukan reformasi. Alhasil, keluarga besar Sabah yang menguasai Kuwait mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri untuk merombak sistem pemerintahannya.

Sejumlah pengamat berpendapat, pemisahan kekuasaan ini bisa dianggap sebagai langkah awal menuju upaya reformasi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa langkah ini masih jauh dari memuaskan. Berdasarkan konstitusi Kuwait, Emir maupun putra Mahkota tidak perlu memberikan pertanggungjawaban terhadap rakyat. Yang bertanggung jawab

adalah Perdana Menteri. Itu Sebabnya, kaum reformis di Kuwait menganggap pemisahan kekuasaan baru sebatas “basa-basi” reformasi, karena mereka sebetulnya menuntut agar jabatan Perdana Menteri diperoleh melalui pemilihan umum dan bukan ditunjuk. Kaum reformasi juga menginginkan agar peran keluarga besar Al-Sabah dibatasi hanya pada urusan-urusan *ceremonial* saja.

B. Sejarah Perjuangan Perempuan Kuwait

1. Kondisi Perempuan Kuwait Sebelum UU Hak Politik Bagi Mereka Disahkan (Sebuah Perjuangan Untuk Kemerdekaan Hak)

Kaum perempuan meliputi separuh dari jumlah umat manusia. Dan oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan, baik dalam urusan pribadi, di dalam keluarga, hingga ke tingkat masyarakat atau kehidupan publik seharusnya senantiasa memperhatikan serta melibatkan peran serta kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hak-hak politik, sosial dan ekonomi perempuan adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari seluruh kerangka hak asasi mereka. Demokrasi adalah sebuah proses inklusif, dan oleh karenanya di dalam kehidupan demokrasi yang sehat semua pandangan atau perspektif dari berbagai kelompok kepentingan harus dipertimbangkan secara seksama dalam tahap perumusan tiap-tiap keputusan. Kepentingan dan pandangan kaum laki-laki, perempuan serta

kelompok minoritas merupakan bagian mutlak dari proses pengambilan keputusan.

Keterwakilan kaum perempuan di dalam institusi-institusi politik Kuwait justru sangat minimal. Berbagai tantangan dan kendala menghadang para perempuan yang masuk kedalam panggung politik. Banyak pihak merasa bahwa masyarakat Kuwait masih cenderung didominasi oleh kaum laki-laki, dan tidak sedikit laki-laki yang merasa terancam oleh kenyataan bahwa ada perempuan yang menjabat pos-pos senior dalam perpolitikan. Dalam dunia politik, kondisi ini diperparah oleh ide bahwa kekuasaan politik adalah segalanya. Hal ini membuat banyak laki-laki semakin enggan berbagi kekuasaan dengan perempuan.

Kehadiran kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Kuwait masih jauh dari cukup. Banyak pemuka perempuan yang membicarakan kesetaraan gender dalam konteks ini. Pada saat ini, kaum perempuan masih sangat kurang keterlibatannya dalam institusi-institusi politik di Kuwait. Ada beberapa faktor umum yang menjadi kendala bagi peran serta aktif perempuan Kuwait dalam perpolitikan. Antara lain adalah kendala waktu yang disebabkan oleh tuntutan karir dan rumah tangga, argumen-argumen kultural dan religius yang menyatakan bahwa tempat bagi perempuan adalah dirumah, serta kurangnya dukungan sumber daya, baik yang berupa dukungan organisasi, pengaruh, dan dana.

Sesungguhnya ada sebuah pemahaman konsep Islam yang memungkinkan orang menghargai kemungkinan-kemungkinan ke arah

“pembebasan kaum perempuan” berdasarkan isi ajaran agama tersebut. Dalam banyak kasus, agama telah memberdaya dan memungkinkan kaum perempuan mencapai serta mewujudkan potensi dan kemampuan mereka sama dengan kaum laki-laki. Tahun 2005 yang lalu, perempuan Kuwait telah membuktikannya, dalam Pemilu tahun itu mereka mendapatkan hak memilih dan dipilih sehingga terlibat dalam kegiatan politik.

Satu Abad silam, tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Syed Sheikh Al-Hadi, Sheikh Tahir Jalaluddin dan sejawatnya dalam gerakan Islam progresif yang terkenal dengan nama Kaum Muda, menyebarkan bahwa gadis-gadis Muslim harus mendapatkan pendidikan terbaik sejajar dengan anak laki-laki. Meski awalnya gagasan-gagasan itu ditentang oleh para tokoh konservatif, secara umum masyarakat Kuwait menyambut ajakan itu dengan tangan terbuka.

Jadi, masyarakat Muslim Kuwait jauh sebelum kemerdekaan sudah menerima sikap liberal terhadap kaum perempuan, dan mendukung atmosfer keterbukaan yang mendukung pendidikan. Maka tidak mengherankan kalau masyarakat Kuwait rata-rata memiliki pendidikan yang tinggi. Angka buta huruf pun sangat rendah di negara ini. Berpengaruh pada pola pikir perempuan Kuwait, walaupun selama ini mereka memiliki profesi sebagai pebisnis ataupun diplomat dan pekerjaan lainnya di administrasi pemerintahan maupun swasta, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan politik. Membuat mereka merasa sudah saatnya reformasi politik segera dilakukan di Kuwait.

Sebelum sejarah baru terwujud, aneka unjuk rasa terjadi, misalnya seperti yang dinyatakan Lulwa al-Mullah salah seorang penggerak unjuk rasa, yang ikut dalam aksi protes menuntut partisipasi perempuan di Parlemen Kuwait. Dalam unjuk rasa tersebut, baik laki-laki maupun perempuan ikut ambil bagian dalam aksi yang mereka gelar. Beberapa perempuan, bahkan menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian khas negara. Tetapi banyak juga di antara mereka yang berpakaian biru muda. Ini sebagai simbol perjuangan perempuan di Kuwait. Para demonstran membawa plakat dengan tulisan “Hak bagi perempuan sekarang juga” dan “Hukum Islam tidak menentang hak bagi perempuan.”²⁴

Unjuk rasa itu diikuti oleh sekitar 600 orang. Mereka umumnya kaum perempuan. Tetapi kaum pria juga tampak hadir meramaikan kegiatan tersebut. Menurut seorang *Mullah* yang berasal dari gerakan kebudayaan perempuan dan Masyarakat Sosial Kuwait, mengatakan bahwa kita tidak bisa begitu saja menghilangkan hak politik perempuan, ini tuntutan kita, karena ada pasal dalam konstitusi Kuwait yang menjamin persamaan pemberian suara dan tidak berlakunya perbedaan jenis kelamin. Walaupun demikian tidak sedikit kelompok lain di Kuwait yang menentang pemberian hak politik kaum perempuan. Karena itu, tidak heran bila parlemen negara Kuwait sudah dua kali menolak usulan pembahasan kebijakan tersebut beberapa tahun belakangan ini.

²⁴*Kisah Dari Kuwait*, dikutip tanggal 15 Oktober 2007, dari: http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=522

Bagi sebagian besar perempuan Kuwait, semua sudah berbeda. Hasil dan keputusan parlemen pun sudah diketahui, dan perempuan Kuwait memasuki sejarah baru. Sesaat setelah pengumuman dilakukan, sambutan tepuk tangan masyarakat yang berada di gedung parlemen bergemuruh. Perdana Menteri Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah mengucapkan selamat kepada perempuan Kuwait yang berhasil memperoleh kemerdekaannya untuk menggunakan hak-hak politik mereka. Pemerintahan al-Sabah mengeluarkan keputusan itu dengan menyatakan bahwa sesungguhnya upaya tuntutan hak politik penuh kepada kaum perempuan sudah mulai dirintis sejak tahun 1999. Setelah berjuang enam tahun akhirnya keinginan itu dikabulkan. Keputusan disepakati setelah menggelar pertemuan selama sepuluh jam.

Peristiwa demi peristiwa itu juga kian menyadarkan kaum perempuan untuk lebih aktif dalam urusan sosio-ekonomi dan politik di Kuwait. Ini dapat dibuktikan oleh kehadiran dan peranan aktif perempuan dalam gerakan reformasi yang marak sejak beberapa tahun lalu itu. Nampak nyata bahwa perempuan telah memainkan peranan yang setidak-tidaknya setara dengan laki-laki dalam menghidupkan program-program dalam memperjuangkan reformasi atau perubahan menyeluruh itu. Perempuan memainkan peranan yang penting dan aktif dalam gerakan reformasi, yang mana menyadarkan mereka untuk lebih giat berpartisipasi dalam masalah sosio-ekonomi dan politik di negaranya.

Setelah dua tahun gerakan reformasi digulirkan, kita masih terus menyaksikan peranan yang dipegang oleh kaum perempuan dalam menjaga perjuangan mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka, adil dan merata. Semangat dan konsistensi mereka yang menyala-nyala dalam memperjuangkan cita-cita tersebut telah memupus ungkapan klise yang menyudutkan perempuan sebagai makhluk rapuh dan mudah goyah. Tekad bulat dan tidak kenal menyerah kaum perempuan dalam perjuangan ini telah melahirkan persatuan yang alamiah atau sinergi dalam menggalang kekuatan dan semangat untuk mewujudkan pranata masyarakat dan pemerintahan yang lebih adil di Kuwait. Untuk maksud tersebut memang perlu disusun sebuah agenda alternatif yang di dalamnya terdapat upaya pemberdayaan perempuan agar dapat mewujudkan potensi mereka untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan pribadi mereka maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pemberdayaan untuk mewujudkan potensi maksimum mereka, maka kaum perempuan pada gilirannya akan memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Ini semua dapat terwujud tanpa sedikitpun melanggar kewajiban-kewajiban sosial, kultural dan keagamaan yang melekat pada diri setiap perempuan.

Meskipun kedudukan perempuan dalam politik merupakan salah satu aspek penunjang pembangunan, perlu diingat peranan-peranan lain yang dibawakan perempuan di dalam masyarakat. Pengalaman bangsa Kuwait menunjukkan bahwa diskusi tentang peranan perempuan di dalam bidang

politik tidak hanya terbatas pada masalah keterwakilan mereka di dalam institusi-institusi formal. Ada banyak perempuan yang setelah menamatkan studi sarjana mereka malah memilih mengurus rumah tangga. Meski mereka tidak memegang posisi formal yang relevan dengan bekal pendidikan dan gelar yang disandanginya, sesungguhnya mereka juga memberi kontribusi bagi pembangunan masyarakat dengan membesarkan anak-anak mereka dalam tata cara dan kondisi yang lebih maju.

C. Pengaruh Internasional Terhadap Gerakan Perempuan Kuwait

Gerakan reformasi yang kini sedang gencar menggeliat di Negara-negara Arab, tekanan dalam negeri dan internasional berpadu menjadi sebuah kekuatan yang mengoyak tabir status quo di Kuwait. Di dalam negeri kaum wanita telah berjuang hampir 40 tahun demi mendapatkan hak politiknya. Perjuangan tersebut menemui titik terang ketika Amerika Serikat menggulirkan konsep Timur Tengah Raya (Greater Middle East) bagi reformasi dunia Arab pada tahun 2002.

Seperti ditulis mantan deputy Menteri Luar Negeri AS urusan Timur Tengah, William Burns, pada harian berbahasa Arab Al Hayat, konsep Timur Tengah Raya tersebut bertumpu pada empat butir utama, yaitu *pertama*, harus ada keterbukaan politik dengan memberi tempat yang layak kepada kaum wanita dan kelompok masyarakat sipil (civil society). *Kedua*, gerakan demokratisasi di timur tengah harus menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik Arab-Israel dan membangun sistem demokrasi di Irak.

Ketiga, gerakan demokratisasi harus dilakukan secara bertahap. Dan *Keempat*, demokratisasi harus berasal dari inisiatif kekuatan-kekuatan politik dalam negeri.²⁵

Ketika Konferensi Tingkat Tinggi dilaksanakan di Tunisia pada bulan Mei 2004, memberi respon positif terhadap konsep Timur Tengah Raya tersebut. KTT Arab itu untuk pertama kalinya mengangkat isu reformasi sebagai bagian dari salah satu agenda utamanya. Isu reformasi yang diusung KTT Arab itu berintikan dari empat poin, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, pemberdayaan kaum wanita, dan peran Civil Society. Isu pemberdayaan kaum wanita Arab menjadi isu tersendiri dalam konsep Timur Tengah Raya. Hal ini disebabkan karena memang peran wanita Arab sangat minim dibandingkan dengan peran wanita di belahan dunia manapun, dibandingkan dengan kaum wanita Afrika sekalipun yang dikenal secara ekonomi tertinggal.

Menurut laporan tahunan pembangunan dunia Arab tahun 2002, hanya 3,5 persen kaum wanita Arab yang duduk di parlemen, dibanding dengan 8,4 persen di Afrika Selatan dan Afrika Tengah. Dalam persentase peran kaum wanita Arab yang sangat minim itu, tidak mencakup seluruh Negara Arab. Hanya negara-negara Arab Mediterania (bertepi ke laut tengah) yang memberi porsi peran cukup pada kaum wanitanya, seperti Lebanon, Suriah, Mesir, Palestina, Tunisia, Maroko, dan Aljazair.

²⁵ *Membaca Kasus Wanita Kuwait Mendapat Hak Politik*, dikutip tanggal 21 Maret 2008, dari: <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0505/20/In/1761433.htm>

Kaum wanita Arab Mediterania yang mendapat status layak itu karena interaksinya dengan Eropa. Para istri pemimpin Negara Arab Mediterania juga sudah terbiasa mendampingi suami mereka dalam acara public. Sementara itu, Jordania meski tidak bertepi ke laut tengah, namun berkat interaksi yang kuat dengan masyarakat Palestina, kaum wanitanya mendapat peran yang lumayan. Irak yang juga tidak bertepi laut tengah, kaum wanitanya mendapat peran yang positif karena interaksinya dengan Turki dan Iran.

Negara-negara Arab Teluk (Kuwait Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kesultanan Oman) dan Yaman, yang secara geografis berada di garis belakang, dikenal lebih konservatif, khususnya menyangkut status kaum wanitanya. Para pemimpin Negara Arab Teluk dan Yaman juga sama sekali tidak memiliki tradisi didampingi istri mereka dalam acara publik. Suatu contoh kasus, Pemerintah Arab Saudi pada tahun 1960 memutuskan membuka sekolah khusus untuk wanita sebagai bagian dari proses pembangunan negara. Namun, kubu konservatif menolak keras keputusan pemerintah itu yang dinilai akan merusak akhlak dan menodai tradisi. Namun, Pemerintah Arab Saudi tetap bertahan meskipun mendapat tantangan keras. Beberapa tahun kemudian disadari, betapa strategisnya pendidikan kaum wanita di Arab Saudi. Berkat pembukaan pendidikan wanita itu, kini di Arab Saudi terdapat kaum wanita yang bergelar master dan doctor, serta masuk dalam berbagai profesi, seperti guru, dokter,

perawat, bankir, dan pegawai departemen, meskipun dalam persentase skala nasional masih sangat minim.

Empat dekade kemudian, persisnya pada tahun 1999. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz berinisiatif menggelar dialog nasional tentang peran wanita dan cara pemberdayaannya. Sejak itu, berbagai dialog dan seminar dalam skala lebih kecil digelar di Arab Saudi untuk membahas peningkatan peran kaum wanita khususnya di bidang politik. Namun setelah enam tahun dari inisiatif Pangeran Abdullah itu peran politik kaum wanita Arab Saudi belum bergeser dari status semula. Kaum wanita Arab Saudi hingga saat ini masih dilarang memberi suara dan mencalonkan diri dalam pemilu.

BAB III
TINDAKAN DAN HAMBATAN PEREMPUAN KUWAIT
DALAM POLITIK

Perjuangan wanita Kuwait mendapatkan hak politiknya sungguh sangat tidak mudah. Kaukus Islam dan kaum tradisional dari Suku dalam parlemen selalu menjadi penghalang kaum perempuan Kuwait meraih hak-hak politiknya. Ketika digelar sidang selama sepuluh jam, beberapa pemimpin suku-suku mayoritas dan anggota parlemen yang beraliran keras menolak keputusan perubahan status tersebut. Sehingga amandemen memberatkan perempuan untuk tidak ikut serta dalam pemilihan umum di Kuwait, hanya karena terkait masalah “penafsiran” agama. Dengan adanya ketentuan itu, maka dengan sendirinya ruang gerak bagi perempuan di dunia politik akan semakin terbatas. Langkah ini di satu sisi dianggap sebagai usaha mencapai kesuksesan. Tetapi di sisi lain bisa membatasi ruang gerak perempuan untuk terlibat langsung dalam berbagai aktifitas kampanye politik.²⁶

Pada tanggal 16 Mei 2008, parlemen Kuwait akhirnya menyetujui RUU hak pilih kaum perempuan. Dengan ini berakhir perjuangan panjang untuk memberi perempuan hak memilih maupun dipilih. Selain itu berakhir pula paradoks yang aneh bahwa di sebuah negara Teluk yang paling liberal, hingga memasuki abad ke-20 kaum perempuannya tidak

²⁶ Daan Dini Khairunida, *Jalan Menuju Kemerdekaan Pengalaman Perempuan Kuwait*, dikutip tanggal 15 Oktober 2007, dari: <http://www.rahima.or.id/SR/19-06/Teropong.htm>

punya hak pilih. Dalam bab ini akan diungkapkan beberapa tindakan dan hambatan yang menghadang kaum perempuan Kuwait dalam memperjuangkan hak politik.

A. Perempuan Kuwait Mulai Terlibat Dalam politik

1. Perempuan Kuwait Ikuti Pemilu Kota

Pertama kali dalam sejarah perpolitikan di Kuwait, kaum wanita masuk dalam daftar calon anggota legislatif melalui pemilu kota yang dilakukan pada Selasa 4 April 2006. Adalah Insinyur Jinan Muhsin Ramadhan dan Dr. Khalida Abdul Hay Al-khadr, dua orang wanita yang bertarung memperebutkan suara di samping 6 orang laki-laki guna merebut kursi di distrik kelima. Pemilu Kuwait sebenarnya baru dilakukan setelah mantan Ketua Dewan Abdullah Saud Al-Muhailabi diangkat menjadi Menteri Urusan Kota.

Sejumlah pusat pemungutan suara telah di buka sejak jam 8 pagi waktu setempat di Kuwait. Dan berakhir hingga jam 8 malam. Dilanjutkan dengan penghitungan suara berikut pengumuman akhirnya. Sesuai informasi resmi Kuwait, jumlah pemilih dalam pemilu di Kuwait adalah 28.000 pemilih yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Tetapi para anggota parlemen Islamis membubuhkan pembatasan, yang mengharuskan pemilih

dan politisi perempuan mematuhi undang-undang Islam. Para pejabat mengatakan, itu dapat berarti aturan berbusana atau TPS terpisah.²⁷

Menurut Perdana Menteri Kuwait Syeikh Nashir Muhammad, keterlibatan kaum perempuan dalam pemilu adalah untuk menyatakan di hadapan dunia tentang sikap negaranya yang memang menghargai kaum perempuan, salah satu pesan yang disampaikan kepada kaum perempuan Kuwait yakni “Majulah ke depan wahai saudaraku kaum perempuan Kuwait. Ambillah posisimu bersama kaum pria Kuwait”.

Meskipun pemilu tersebut hanya berlangsung dalam lingkup wilayah yang terbatas, tapi keterlibatan kaum perempuan dalam pemilu membuat pesta demokrasi itu menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk liputan media massa lokal dan internasional. Sebab, pemilu tersebut merupakan pemilu pertama di Kuwait yang melibatkan kaum perempuan sebagai calon anggota legislatif yang bertarung memperebutkan suara. Tradisi kehidupan politik dan partai politik di Kuwait memiliki keistimewaan. Yakni tidak ada kategorisasi antara kaum Islami, Liberalis, Salafi, atau Al-Ikhwan Al-Muslimun.

Terkait ketetapan pencalonan kaum perempuan, sebenarnya pemerintah Kuwait telah menetapkan pada 5 Juni 2005, untuk menyetujui hal tersebut. Jumlah anggota Dewan Kota adalah 16 orang, 10 orang diantaranya diambil melalui pemilihan langsung dan rahasia, sementara 6 orang lainnya merupakan hak prerogatif pemerintah.

²⁷ *Perempuan Kuwait Sekarang Boleh Jadi Caleg*, dikutip tanggal 22 Desember 2007, dari: <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2005-05/2005-05-17-voa6.cfm>

2. Perempuan Kuwait Ikuti Pemilu 2006

Dalam pemilu 2006, perempuan Kuwait ikut berpartisipasi. Pemilu kala itu, para perempuan tersebut berpartisipasi bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kandidat anggota parlemen. Pemilu yang diadakan tanggal 29 Juni 2006 itu, diikuti oleh 253 kandidat. Dimana 28 orang diantaranya adalah perempuan (dengan komposisi perempuan sebanyak 57% dari seluruh warga yang ikut pemilu), yang siap memperebutkan 50 kursi di parlemen. Setelah 1 tahun memenangkan hak berpolitik, ke-28 perempuan Kuwait tersebut akhirnya benar-benar terjun ke panggung politik²⁸.

Walaupun demikian, ke-28 perempuan itu, diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat dari para kandidat laki-laki. Selain itu, mereka juga akan menghadapi banyak halangan mengingat tradisi Kuwait yang tidak mendukung ide kesetaraan peran perempuan dan laki-laki. Kandidat perempuan berharap dapat meraih beberapa kursi di parlemen, dengan lebih dari 50% (= 195.000 orang) dari 340.000 pemilih adalah perempuan. Meski akhirnya bisa berpartisipasi dalam pemilu, Salwa Said salah satu kandidat perempuan independen, mengaku pesimis bahwa perempuan akan menang. Menurut kandidat lain lulusan Amerika Serikat, Fatima al-Abdali mengatakan bahwa adanya partisipasi perempuan dalam pemilu tersebut adalah hari yang bersejarah bagi Kuwait, Perempuan manapun yang sukses

²⁸ *Perempuan Kuwait Ikuti Pemilu*, dikutip tanggal 16 Desember 2007, dari: <http://www.beritaindonesia.co.id/data/arsip/2006/06/index.php?page=15>

dalam pemilu akan menjadi kesuksesan seluruh rakyat Kuwait, perempuan Teluk Arab.

Selain ke-28 perempuan yang mayoritas kandidat independen, 50 kursi parlemen juga akan diperebutkan oleh 60-70 kandidat dari pihak oposisi, seperti kelompok Islam, Liberal, dan nasionalis. Menurut pengamat politik Kuwait, meski jumlah perempuan sedikit namun mereka sangat vokal. Walau demikian, mereka tetap tidak akan dapat menang karena tidak memiliki dukungan kuat seperti yang dimiliki kandidat lain yang datang dari daerah-daerah Syiah dan suku-suku lainnya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh mantan Menteri Sumber Daya Minyak Kuwait. Beliau berpendapat bahwa peluang kandidat perempuan untuk menang sangatlah kecil, karena laki-laki yang ada di kelompok konservatif tidak pernah bisa percaya perempuan bisa menjalankan tugas sebagai anggota parlemen.

Para pejabat Islam di Kuwait telah menasihati para pemilih perempuan agar mempertimbangkan unsur pengalaman dan juga tidak mengabaikan nasihat para suami mereka dalam memilih kandidat mereka. Menurut para pejabat Islam tersebut, paling tidak 80% perempuan akan mengikuti pendapat atau nasihat para suami atau bapak mereka, sedangkan selebihnya (20%) akan memutuskan sendiri. Namun keadaan ini tentunya tidak sepenuhnya benar, mengingat banyaknya aktivis-aktivis perempuan muda yang memperjuangkan kedudukan dan status perempuan di segala bidang. Menurut salah satu aktivis perempuan, Maha Barjes, "Hari ini saya

merasa seperti seorang warga negara seutuhnya. Hasil pemilu kali ini akan berbeda, bahkan kaum laki-laki pun menyadarinya”.

Parlemen Kuwait telah sepakat untuk memberikan hak memilih dan hak menjadi kandidat kepada kaum perempuan pada 2005. Pernyataan tersebut dicantumkan dalam amandemen undang-undang pemilu yang dipercayai telah berhasil didorong oleh Emir Kuwait yang berkuasa saat itu, Syeikh Sabah al-Ahmad al-Sabah saat beliau masih menjabat sebagai perdana menteri. Keputusan disepakati setelah menggelar pertemuan selama sepuluh jam. Bila melihat ke belakang, sebelum adanya keputusan itu, beberapa pemimpin suku-suku mayoritas dan anggota parlemen yang beraliran keras menolak keputusan perubahan status tersebut.²⁹

Puluhan perempuan pemilih, yang mewakili 57 % orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih, mulai berbaris di luar lokasi yang dirancang sebagai tempat pemungutan suara. Naffisa binti Al-Hasan didaerah suku Sabah As-Salem yang dicap sebagai “induk semua kabupaten” karena memiliki jumlah pemilih paling banyak – sekitar 50 perempuan yang menutup pakaian mereka dengan jubah luar berbaris di bawah sengatan matahari.

Zahara Ramadhan Benbehani yang tiba dengan kursi roda didorong putrinya, merupakan perempuan pertama yang memberi suara di gedung sekolah tersebut kendati memperoleh hak politik penuh setahun lalu, sebagian perempuan yang mencalonkan diri mengatakan mereka

²⁹ *Kaum Perempuan Kuwait Dapatkan Hak Politik Mereka*, dikutip tanggal 5 Desember 2007, dari: <http://www.ham.go.id/index HAM.asp?menu=artikel&id=553>

menghadapi intimidasi selama kampanye. Salah seorang dari mereka mengatakan dia bahkan menerima ancaman mati yang memaksa dia mundur dari pencalonan.

Menteri Dalam Negeri Syeikh Jaber Mubarak al-Sabah menyambut baik banyaknya pemilih yang memberikan suaranya. Beliau mengatakan mereka diberi tahu para hakim (yang mengawasi TPS) bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat tinggi dan di luar dugaan. Hari ini kaum perempuan menang dengan datang dan memberikan suaranya. Beliau yakin hal ini merupakan keberhasilan penting bagi perempuan. TV pemerintah melaporkan jumlah pemilih di beberapa TPS mencapai 40% pada 4 jam pertama.

Pemilihan tersebut dilaksanakan menyusul kampanye paling sengit dalam 44 tahun demokrasi parlementer Kuwait, saat oposisi berusaha mendorong agenda pembaruannya, yang meliputi pengurangan jumlah daerah pemilihan sebagai salah satu cara menghapus korupsi. Selama kampanye, para calon oposisi menuduh pesaing mereka yang pro-pemerintah membeli suara.

Pemilih memberi suara di 94 tempat pemungutan suara di berbagai bangunan sekolah, masing-masing 47 untuk pria dan perempuan yang memberi suara secara terpisah berdasarkan hukum pemilihan umum. Dari ke-341 ruang pemungutan suara, 182 disediakan untuk perempuan. Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 waktu setempat (Pukul 12.00 WIB) dan dijadwalkan ditutup 12 jam kemudian, sementara hasil penghitungan

awal diperkirakan mulai diperoleh sekitar tengah malam (Pukul 04.00 WIB), karena suara dihitung secara manual.

Kementerian Kehakiman, yang mengawasi pemilihan umum tersebut, menunjuk 700 pria sebagai hakim untuk menyelenggarakan pemungutan suara, karena Kuwait tak memiliki perempuan hakim. Pemerintah telah mengizinkan para hakim untuk menugaskan perempuan sebagai pembantu guna mengkonfirmasi identitas perempuan yang menjadi pemilih dan mengenakan cadar dan menolak untuk memperlihatkan wajah mereka kepada pria, sejalan dengan tradisi dan ajaran ketat agama. Empat puluh enam mantan anggota parlemen, termasuk 28 dari 29 anggota parlemen oposisi, berharap akan terpilih kembali, selain 12 mantan anggota yang bertugas dalam majelis terdahulu.

B. Sikap Parlemen Konservatif Islam Kuwait Terhadap Kaum Perempuan

Dalam menangani isu-isu perempuan, kaum konservatif menggunakan dan mengatasnamakan Islam. Fatwa ulama Konservatif menyatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala negara. Hadits yang mereka kutip adalah apabila perempuan menjadi kepala negara maka negara tersebut akan mengalami kerusakan. Namun demikian di sisi lain, seorang ulama terkemuka Maulana Ashraf Ali Thanvi menjustifikasi bahwa dalam negara demokrasi, seorang pemimpin tidak memiliki kekuatan absolut, akan tetapi sangat tergantung kepada suara-suara anggota parlemen yang mayoritas laki-laki. Fatwa terakhir ini hanya ingin menjawab

kekhawatiran ulama konservatif akan kekuasaan absolut yang akan dimiliki oleh seorang kepala negara, sedangkan ada kemungkinan kepala negara tersebut adalah seorang perempuan. Meskipun ada upaya-upaya untuk berpikir lunak terhadap perempuan, namun itu sesungguhnya bukan untuk perempuan, tapi untuk kepentingan politik.³⁰

Konservatisme telah lama dianggap sebagai “ideologi” yang bertanggung-jawab terhadap kemunduran dan keterbelakangan kaum Muslim. Pandangan-pandangan konservatif selalu dianggap berbahaya karena ia bertentangan dengan semangat pembaruan dan kemajuan. Sejak gerakan kebangkitan Islam muncul di Mesir pada awal abad ke-19, konservatisme menjadi target utama para pembaru muslim. Tokoh-tokoh seperti Rifa’at Rafi’al-Thahtawi, Muhammad Abduh, dan Ali Abd al-Raziq, baik secara radikal maupun perlahan-lahan mengikis ajaran-ajaran konservatif. Begitu juga tokoh-tokoh dari generasi selanjutnya, termasuk generasi pasca 1967, seperti Hassan Hanafi di Mesir, Tayyib Tizzini di Suriah, dan Mohammed Abed al-Jabiri di Maroko, mendeklarasikan perang yang sama terhadap konservatisme.³¹ Namun, negara kecil, modern, kaya raya seperti Kuwait identik dengan Konservatisme yang berkembang cukup besar di Kuwait. Bahkan, kaum konservatif banyak yang terlibat dalam pemerintahan, salah satunya dalam parlemen. Bertahun-tahun parlemen

³⁰ Syafiq Hasyim, *Feminisme; Mengambil Hikmah dari Barat*, dikutip tanggal 22 Desember 2007 dari: <http://www.rahima.or.id/SR/06-02/Fikrah.htm>

³¹ Luthfi Assyaukanie, *Dari Taksonomi (Model) Lama ke Islam Liberal; Pemikiran Islam Modern*, dikutip tanggal 16 Desember 2007, dari: <http://onisuya.wordpress.com/2007/10/01/jamaah-islam-liberal/>

konservatif Islam Kuwait selalu menghalangi kaum perempuan terlibat dalam kegiatan politik seperti tidak menyetujui perubahan undang-undang hak politik bagi perempuan karena selama ini hakpolitik hanya diberikan pada kaum lelaki saja. Selama ini konservatif memang menjadi kubu yang menolak ide perempuan berpartisipasi dalam pemilu, karena mereka tidak yakin perempuan akan bisa memimpin. Maka, sebuah RUU hak pilih perempuan sempat ditahan di Parlemen pada saat terakhir. Ketika itu hak pilih hanya untuk pemilihan daerah dan kota madya. Usulan yang diterima tanggal 16 Mei 2005, juga menyangkut pemilihan umumnya, jadi pada tingkat nasional. Dengan begitu mulai sekarang untuk pemilu parlemen kaum perempuan tidak hanya berhak memilih tapi juga berhak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Hal terakhir inilah yang membuat kaum konservatif di parlemen menahan RUU tersebut. Sebenarnya kaum konservatif bisa menerima ide bahwa kaum perempuan dapat memberikan suara, tetapi bahwa seorang perempuan bisa mencalonkan diri dan mengambil posisi memimpin, itu dianggap diluar batas. Menurut mereka hal ini bertentangan dengan syari'ah, hukum Islam. Bahkan kaum konservatif mengambil contoh salah satu sunnah Nabi "sebuah bangsa yang mempercayakan pimpinan pada seorang perempuan, tidak akan berhasil".³² Tetapi akhirnya RUU hak politik bagi perempuan tetap disahkan. Kini perempuan Kuwait boleh terlibat dalam pemilu, tidak hanya memberikan suara tetapi dapat juga mencalonkan diri.

³² Bertus Hendriks, *Hak Pilih Bagi Perempuan Kuwait; Berakhirlah Sudah Paradoks Aneh*, dikutip tanggal 16 Desember 2007, dari: http://www.ranesi.nl/arsipaktua/timurtengah/hak_pilih_perempuankuwait_050517

C. Politisi Perempuan Kuwait Masih Terhalang Tradisi

Saat Aisha al-Rsheid melawan arus tradisi dengan berkampanye untuk memperoleh kursi parlemen pada pertemuan yang hanya dihadiri kaum pria, ia menerima sebuah surat yang mengingatkannya untuk berhenti bertindak seperti pria dan melupakan perebutan kursi parlemen. Kaum perempuan di negara kecil namun kaya di kawasan Teluk tersebut diperbolehkan mengajukan diri menjadi anggota parlemen dan memberikan suara pada pemilu. Namun, mereka mendapati tembok penghalang besar berupa tradisi baik dari kaum pria maupun kaumnya sendiri. Meski demikian, hal ini tidak meruntuhkan semangat al-Rsheid, seorang wartawati sekaligus pengusaha yang meyakini tradisi yang melarang perempuan berpolitik tidak ada dalam kitab suci umat Islam, Al-quran, tidak ada pula dalam konstitusi.

Dewan Legislatif mengesahkan perubahan undang-undang yang diajukan kabinet, meski mendapat perlawanan dari politisi muslim dan suku. Para oponent berpendapat hak-hak politik perempuan bertentangan dengan hukum Islam dan pandangan hidup bangsa Kuwait. Perempuan seharusnya tetap tinggal di rumah dan merawat keluarga. Setelah disahkannya perubahan undang-undang itu, kabinet Kuwait mengangkat Massouma al-Mubarak sebagai Menteri Perencanaan dan Menteri Negara urusan Pembangunan administratif.³³ Perempuan pertama yang menjadi anggota kabinet. Sejak itu beberapa kelompok perempuan

³³ *Kuwait Tunjuk Wanita Sebagai Menteri*, dikutip tanggal 27 Desember 2007, dari: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/13/int05.htm>

menyelenggarakan seminar-seminar, beberapa diantaranya mengundang pembicara asing, dalam isu seperti bagaimana melakukan riset pemilih, berbicara di depan publik, dan sistem pemilihan serta bagaimana memilih seorang kandidat.

Meski demikian, jumlah perempuan yang menghadiri seminar-seminar itu sangatlah sedikit. Maha al-Loghani seorang sekretaris mengatakan dia mungkin akan memberikan suara bagi pemilu parlemen tahun depan. Karena menurutnya perempuan masih perlu waktu untuk menjadi politisi karena umumnya perempuan emosional. Di samping sentimen, para perempuan Kuwait umumnya berpendidikan tinggi, bahkan menduduki posisi jabatan yang tinggi. Penulis Laila al-Othman secara terbuka menyatakan perlu membuka kepala perempuan Kuwait untuk membuang karat yang telah lama bersarang di sana.

Yang akan memuncak adalah dua perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Dewan Kota pada 4 April 2006. Kursi tersebut kosong saat seorang Dewan Kota diberikan portofolio kabinet sebulan sebelumnya. Pemerintah sebelumnya telah menunjuk dua orang perempuan untuk mengisi kekosongan itu, namun ini akan menjadi pertama kali perempuan memperebutkan sebuah kursi atau suara. Tidak diragukan lagi, perempuan akan menjadi kekuatan politik yang kuat di Kuwait secara keseluruhan.

Pemerintah telah mendaftarkan perempuan yang berhak memberikan suara dibandingkan 139.176 pemberi suara pria. Parlemen telah membentuk panel urusan perempuan dan mengorganisasi konferensi soal perempuan dan

hak-hak manusia yang membahas kekerasan terhadap kaum perempuan. Gerakan Islam mendidik perempuan tentang pemberian suara, namun mereka belum mendukung kandidat perempuan. Karena selama ini dalam setiap pemilihan mereka terbiasa memilih kandidat laki-laki, sebelum perempuan diizinkan mencalonkan diri.

D. Calon Legislatif Perempuan Gagal Masuk Parlemen

Kubu oposisi Kuwait memenangi mayoritas kursi parlemen lewat pemilihan umum yang hasil resminya diumumkan tanggal 30 Mei. Namun, tak ada seorang pun calon legislatif perempuan yang berhasil menjadi anggota parlemen dalam pemilihan umum historis ini, di mana kaum perempuan untuk pertama kali bisa mencalonkan diri. Kubu oposisi, yang merupakan aliansi longgar dari kelompok-kelompok kanan, liberal, dan nasionalis, kini menguasai 33 dari 50 kursi yang ada di parlemen.

Hasil pemungutan suara tanggal 30 Mei sebagai kekalahan telak bagi pemerintah negara Teluk yang kaya minyak itu. Oposisi memerlukan 33 kursi untuk dapat menjadi mayoritas mutlak di parlemen, karena 15 dan 16 menteri kabinet merupakan anggota parlemen *ex-officio* (karena jabatan) yang juga memiliki hak suara meski tak dipilih rakyat. Dengan demikian, jumlah seluruh anggota parlemen Kuwait mencapai 65 orang.

Kemenangan mencolok yang diraih oposisi bisa mendorong pemerintah memberhentikan menteri lewat pemungutan suara merupakan salah satu dari sedikit kewenangan yang dimiliki parlemen Kuwait.

Parlemen Kuwait memiliki kekuasaan legislatif maupun pengawasan, dan dapat pula memeriksa perdana menteri. Berdasarkan hukum Kuwait, setidaknya harus ada seorang menteri yang berasal dari anggota parlemen yang terpilih melalui pemilu. Kabinet Kuwait akan mengundurkan diri secepatnya dan pemerintahan yang baru harus sudah terbentuk dalam waktu dua pekan. Setelah itu, baru parlemen akan memulai masa tugasnya yang baru.

Kelompok Muslim Sunni menjadi pemenang utama dalam pemilu tersebut dengan merebut 17 kursi, meningkat dari 14 kursi yang dimiliki dalam parlemen sebelumnya. Kemenangan itu termasuk kemenangan bagi seluruh kelima caleg dari Gerakan Konstitusional Islam, sayap politik kelompok Persaudaraan Islam. Tidak ada seorang perempuan pun yang berhasil terpilih sebagai anggota parlemen dalam pemilu pertama di Kuwait yang diikuti oleh para caleg perempuan. Di negara keemiran yang konservatif itu, sebelumnya kaum perempuan tak pernah dilibatkan dalam pemilu legislatif. Aktivis perempuan terkemuka, Rula Dashti, memperoleh suara terbanyak di antara para caleg perempuan. Di sebuah daerah pemilihan, ia berhasil meraih 1.539 suara dan menempati posisi kelima dalam urutan pemenang. Sedangkan di sebuah daerah pemilihan lain, mantan pejabat kementerian penerangan Nabila al-Anjari meraih 1.036 suara. Dua caleg pria yang menjadi pemenang di kedua daerah pemilihan itu masing-masing meraih sekitar 5.000 suara.

Kaum perempuan Kuwait memperoleh hak berpartisipasi dalam pemilu setelah adanya gerakan yang menyoroti soal korupsi dan menuntut dilakukannya reformasi pemilu. Namun, tak seorang pun dari 28 kandidat perempuan berhasil meraih kursi dalam pemilu. Padahal, populasi pemilih perempuan mencapai 57% dari total 340.000 orang pemilih sah.³⁴ Para pemilih perempuan, yang merupakan 57 persen dari seluruh rakyat pemegang hak pilih, tampak mengantri di berbagai tempat pemungutan suara, tapi jumlah mereka kemudian makin menyusut. Seluruh suara yang diberikan kaum perempuan Kuwait diperkirakan antara 55 sampai 65 %.

³⁴ *Caleg Perempuan Kuwait Tak Peroleh Kursi*, dikutip tanggal 27 Desember 2007, dari: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0607/01/int04.htm>

BAB IV

UPAYA PERJUANGAN EMANSIPASI HAK POLITIK

PEREMPUAN KUWAIT DI PARLEMEN

Kuwait adalah sebuah negara konservatif, hal ini merupakan salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik di Kuwait. Kaum konservatif tidak menyetujui perempuan ikut terlibat dalam kegiatan politik, karena bertentangan dengan penafsiran agama dan tradisi budaya yang telah lama berlaku di Kuwait. Di dalam parlemen terdapat banyak kaum konservatif, sehingga sering sekali parlemen bertentangan dengan pemerintah. Apa pun yang diajukan pemerintah selalu mendapat tantangan, maka dengan adanya undang-undang hak politik bagi perempuan dari pemerintah maka hal itu tentu saja mendapat semacam perlawanan dari parlemen. Dalam bab ini akan diungkapkan berbagai upaya yang dilakukan kaum perempuan Kuwait untuk memperjuangkan hak politik mereka dalam parlemen dan berbagai argumen dari beberapa pihak tentang perjuangan kaum perempuan Kuwait ini.

A. Perjuangan Pembentukan Amandemen UU Pemilu (Hak Politik Bagi Semua Golongan)

Disahkannya amandemen pemberian hak politik bagi kaum perempuan, mengakhiri perjuangan puluhan tahun para perempuan Kuwait

untuk mendapatkan hak mereka. Sesi pembahasan amandemen ini berlangsung seru dan mengejutkan. Parlemen bersidang untuk membicarakan undang-undang yang diperkenalkan dua pekan sebelumnya. Undang-undang itu memberi akses bagi perempuan Kuwait untuk mencalonkan diri di dewan kota. Namun, diskusi anggota parlemen dan kabinet segera tertuju pada amandemen menyeluruh atas undang-undang pemilu Kuwait. Dalam pembicaraan itu, parlemen dan kabinet menyinggung hak perempuan dalam politik. Selama ini Kuwait hanya memberi hak politik penuh bagi kaum lelaki saja untuk ambil bagian dalam parlemen.

Dalam 24 jam, parlemen berhasil mengesahkan amandemen yang mengganti kata “laki-laki” dari pasal 1 Undang-Undang Pemilu. Dalam voting amandemen itu, 35 setuju dan 23 menentang. Meski demikian, sejumlah kalangan di parlemen menyebut hukum Islam tetap harus diberlakukan.³⁵ Implikasi amandemen ini masih menjadi pertanyaan di kalangan aktivis perempuan. Sebagian di antara mereka menyebut “mungkin saja nanti dalam pemungutan suara, perempuan dan laki-laki memilih ditempat yang terpisah”.

Amandemen hak politik perempuan Kuwait ini memperoleh sambutan hangat dari Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Richard A. Boucher mengatakan, Kuwait telah memasuki masa penting. “Dengan hak politik itu, perempuan Kuwait akan mampu melangkah maju seperti halnya perempuan di negara lainnya”.

³⁵ *Menunggu Hak Politik Perempuan Kuwait*, dikutip tanggal 19 Maret 2008, dari: <http://www.korantempo.com/news/2005/5/18/Internasional/42.htm>

Perdana Menteri Kuwait Sheik Sabah al-Jaber al-Sabah sesungguhnya telah lama mendapat tekanan mengenai reformasi undang-undang politik bagi perempuan di negara tersebut. Belakangan ini, isu mengenai hak politik perempuan ini merambah ke tubuh kabinet. Sheikh Sabah diperkirakan akan menunjuk seorang perempuan untuk menempati pos menteri kesehatan dalam beberapa pekan ke depan. Sehari setelah disahkannya amandemen itu, ruang-ruang publik dipenuhi percakapan tentang masa depan politik perempuan Kuwait. Farhah al-Haidar, seorang guru sekolah dasar di Kuwait, mengatakan undang-undang itu melegakan. Meski demikian, ia menyebut amandemennya terlambat keluar. “Perempuan tidak mungkin ikut mencalonkan diri dalam pemilu dewan kota”. Farhah dan para perempuan lainnya harus menunggu setidaknya hingga 2007, saat berlangsungnya pemilu parlemen sebagaimana dijadwalkan oleh pemerintah.

B. Aktifis perempuan Mencari Dukungan Ke Berbagai Pihak

Shaika Ali J. Al-Sabah, adalah seorang anggota keluarga kerajaan dan dewasa ini, sedang menyelesaikan kuliah pada Universitas Gulf di Kuwait dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mahasiswa senior ini juga sedang menyelesaikan kuliahnya pada jurusan Management Information Systems. Beliau juga aktif sebagai pejuang yang gigih pendukung hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Dalam pembahasan Tantangan Masa Depan, khususnya tentang visi perempuan dan anak-anak pada Festival of Thinkers di Abu Dhabi, Shaika pun turut mencari dukungan dan berusaha menarik simpati dari berbagai pihak demi perjuangan hak politik kaum perempuan Kuwait di Parlemen. Beliau mengatakan dengan lantang dalam pidatonya mengajak kaum perempuan untuk melanjutkan perjuangan dengan lebih gigih. Tantangan masa depan tidak akan mengendor bahkan mungkin saja akan lebih dahsyat. Kemiskinan dan segala kepincangan dunia akan menghasilkan korban yang besar jumlahnya, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Karena itu kaum perempuan harus menyatukan diri sesama pejuang perempuan lain. Kaum perempuan harus bekerja keras melanjutkan perjuangan habis-habisan.

Perjuangan masa depan bukan hanya sekedar memperkuat persatuan diantara perempuan, tetapi juga mendidik kaum laki-laki untuk menghormati perempuan. Sebenarnya sejak dulu, laki-laki dan perempuan telah berjuang bersama-sama dan menghasilkan banyak kebaikan kepada umat manusia di dunia. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus terus berjuang dan meningkatkan perjuangannya itu. Perempuan harus banyak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan upaya-upaya pemberdayaan lainnya. Kaum laki-laki juga harus melakukan hal yang sama. Lebih dari itu, kaum laki-laki harus diberikan petunjuk dan diyakinkan untuk belajar menghargai perempuan.

Kaum perempuan bukan sekedar warga negara kelas dua, tetapi mempunyai harkat dan martabat yang harus dihormati.

Shaika Ali J. Al-Sabah, seorang putri penguasa Kuwait tidak menyembunyikan diri dan menikmati kedudukannya sebagai keluarga penguasa, walaupun sudah menikah dan mempunyai anak, hati nurani dan jiwa sosialnya tersentuh untuk terjun dalam perjuangan hak politik perempuan di parlemen negaranya. Beliau tetap belajar dan bekerja keras sebagai pejuang aktifis layaknya pejuang LSM lainnya. Demi terwujudnya keadilan bagi perempuan Kuwait dengan disahkannya perubahan Undang-undang hak politik bagi perempuan. Dimana perempuan mendapatkan hak pilih dan dipilih dalam kegiatan politik apapun di Kuwait.

1. Dukungan Dari Direktur Institut Pembinaan Perempuan Kuwait

Kulsar Al-Johan, direktur Institut Pembinaan Perempuan, turut memberikan dukungan pada perjuangan kaum perempuan Kuwait yang menuntut hak politik. Menurutnya, setelah UU hak politik bagi perempuan disahkan, mereka diperbolehkan aktif di Politik tingkat nasional. Tidak hanya untuk kaum elite, RUU ini dianggap langkah awal yang positif dari pemerintah, karena di dalam UUD Kuwait tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Saat ini adalah momen yang paling tepat untuk melanjutkan perjuangan peran perempuan di wilayah negara-negara teluk baik di bidang politik dan kemasyarakatan. Perempuan di Kuwait sudah

merencanakan itu sejak lama. Dan sekarang, saatnya langkah maju tersebut akan diwujudkan. Namun hal itu tidaklah mudah, karena banyak tantangan yang harus dilalui. Misalnya, kaum oposisi yang menentang RUU tersebut. Penentangan juga didapat dari parlemen, sebanyak 20 anggota parlemen menentang RUU tersebut. Namun, di sisi lain tekanan bagi perempuan untuk terus melangkah juga besar, ditambah lagi dengan kemajuan posisi perempuan yang dicapai di negara tetangga seperti Bahrain dan Qatar. Kemajuan posisi perempuan di wilayah itu tentu saja mempengaruhi juga kedudukan perempuan di Kuwait.

Di Kuwait sendiri terdapat kesenjangan mengenai peran perempuan. Ada perempuan yang sangat aktif memegang peran kunci seperti dalam dunia bisnis, pendidikan, pemerintahan atau diplomatik. Namun di sisi lain perempuan Kuwait juga belum mendapat hak kebebasan. Jika melihat ke belakang di tahun 1960, perempuan di Kuwait sudah sadar akan persamaan hak seperti adanya organisasi khusus perempuan. Penyebabnya karena, Kuwait dipenuhi kaum Konservatif. Hal itu juga terlihat di parlemen yang dipenuhi oleh kaum konservatif atau kelompok-kelompok Islam yang menghalangi apakah RUU itu bisa digolkan dalam waktu singkat.

2. Pendapat Umum Tentang Perempuan Dan Emansipasi

Emansipasi yang dituntut oleh kaum perempuan Kuwait memang berasal dari negeri Barat, dimana jauh sebelum masa

renaissance ketika masa kejayaan agama Kristen banyak dogma-dogma yang mereka ajarkan yakni menentang ilmu pengetahuan dan merendahkan kaum perempuan. Akhirnya perempuan bangkit dan menuntut kebersamaan hak dan kebebasan yang sama dengan pria dalam segala hal (di Barat). Namun yang diserap perempuan Islam modern hanya kebebasan dari keterbelengguannya dari berbagai hal. Salah satunya yang dituntut perempuan Kuwait adalah hak untuk berpolitik, yang selama ini hanya dimiliki pria. Kalau ilmu pengetahuan bagi perempuan Kuwait justru sangat penting sekali dibutuhkan oleh umat manusia. Kenyataannya perempuan Kuwait rata-rata berpendidikan tinggi, sehingga diantara mereka banyak yang bekerja menempati posisi yang bisa menyamai kaum laki-laki, seperti pebisnis, pekerja di bidang industri, diplomat. Namun cuma satu hal yang sangat disayangkan mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan politik dinegaranya.

Selain itu, emansipasi yang didengungkan oleh barat sebenarnya telah dimiliki umat Islam jauh sebelum adanya emansipasi didengungkan, Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan dan menempatkannya pada tempat yang terhormat, memberikan persamaan hak. Bagi para ulama, ketimpangan dan penindasan yang masih sering terjadi di kalangan umat Islam lebih disebabkan oleh praktek dan tradisi masyarakat setempat, ketimbang oleh ajaran Islam.

Seperti kita ketahui, tidak satu ayat pun dalam Al Quran yang menampakkan bias gender. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sejak di surga hingga turun ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma ataupun kuma). Di samping itu, bukan pasangan Adam yang disalahkan, melainkan syetan yang dikatakan menggoda keduanya hingga memakan buah dari pohon keabadian.

Di muka bumi, baik laki-laki maupun perempuan diposisikan setara, derajat mereka ditentukan bukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh iman dan amal shaleh masing-masing. Sebagai pasangan hidup, laki-laki diibaratkan seperti pakaian bagi perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Namun, dalam kehidupan rumah-tangga, masing-masing mempunyai peran tersendiri dan tanggung jawab berbeda, seperti lazimnya hubungan antar manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, laki-laki dan perempuan dituntut untuk berperan dan berpartisipasi secara aktif, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesungguhnya dalam Islam, kaum muslimin tidak mengenal sama sekali tentang feminisme. Sebab peradaban Islam tidak mengajarkan kaum muslim untuk hidup dengan menindas para perempuan justru Islam hadir dengan konsepnya yang

kelas tentang laki-laki dan perempuan, pada saat manusia kebingungan tentang hakikat perempuan.³⁶

Perempuan di Timur Tengah sering mengalami kondisi-kondisi politik, sosial, dan budaya yang sensitif dan rumit, yang membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dalam arena politik. Banyak perempuan yang menjauhkan diri dari partisipasi politik demi menghindari kontroversi. Tafsiran-tafsiran keagamaan konservatif kadang membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat, atau mencegah mereka bercampur dengan kaum pria, atau menduduki jabatan pemerintahan. Juga ada dimensi keluarga yang perlu dipertimbangkan, yang masih menjadikan perempuan secara tradisional bertanggung jawab terhadap tugas-tugas rumah tangga.³⁷

Oleh karena itu, meskipun di kalangan muslim pada kenyataannya masih selalu dijumpai diskriminasi terhadap perempuan, namun yang mesti dikoreksi adalah masyarakatnya, bukan agamanya. Di tanah kelahirannya sendiri, emansipasi dan kesetaraan gender masih belum bisa menghapuskan sama sekali berbagai bentuk pelecehan, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan. Di samping itu, pejuang hak asasi kaum perempuan Kuwait juga seyogyanya diletakkan dalam bingkai pembangunan umat secara keseluruhan, tidak hanya memikirkan kepentingan kaum perempuan saja. Mereka

³⁶ Sidik Jatmika & Vonny Nuansari, *Dinamika Partisipasi Politik Perempuan Iran*, LPPI UMY, Yogyakarta, 2002, hal. 38

³⁷ Rafi'ah Al Tal'ei, *Manakah Perempuan Dalam Politik Timur-Tengah?*, dikutip pada tanggal 10 Januari 2008, dari:

<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=22151&lan=ba&sid=1&sp=0>

juga perlu bersikap lebih bijak dan hati-hati dalam mengutarakan gagasan dan agenda mereka.

C. Kampanye Calon Legislatif Perempuan Kuwait

Kampanye di Kuwait biasanya dilakukan dalam tenda-tenda dan di waniyas, gedung atau ruangan di rumah dengan pintu masuk yang terpisah. Di ruangan itu biasanya kaum pria bercakap-cakap, main kartu dan menonton televisi. Perempuan yang ingin berpartisipasi bahkan pendukung gerakan liberal Barat, biasanya harus duduk di pinggir atau menonton pidato di televisi sirkuit tertutup di tenda sebelah yang lebih kecil. Meski demikian, ada tanda-tanda kandidat akan mendobrak tradisi untuk memperoleh suara dari kaum perempuan.

Dalam sebuah tenda besar di kawasan miskin di Sulaibiya, para perempuan dengan pakaian abaya yang menutupi sekujur tubuh mereka, duduk di kursi dan karpet mendengarkan kisah-kisah para perempuan Kuwait yang menikah dengan orang Arab yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*). Stateless Arab sering kali berasal dari Irak atau Arab Saudi telah tinggal di Kuwait selama beberapa generasi tanpa memiliki kewarganegaraan. Banyak yang bekerja sebagai tentara sebelum invansi Irak tahun 1990, namun sebagian besar kini menjadi pengangguran dan tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Pemerintah tengah mempelajari kasus-kasus mereka dan menyatakan tidak semuanya layak menerima kewarganegaraan karena menyembunyikan

paspor dari negara asalnya. Mereka tidak memiliki paspor Kuwait, dan pernikahan serta kelahiran anak-anak mereka tidak tercatat. Penyelenggara acara ini adalah kandidat al-Rsheid dan Rola Dashti, ekonom lulusan AS yang juga mengincar kursi parlemen, menyebut acara tersebut sebagai “Perempuan-perempuan Kuwait yang terlupakan” dan menjelaskan isu itu akan menjadi agenda utama mereka jika mereka menang.

BAB V

KESIMPULAN

Kuwait adalah negara kawasan Teluk yang memiliki parlemen tertua. Namun, sejak tahun 1962 Kuwait adalah salah satu negara di kawasan itu yang paling terlambat mengizinkan perempuan ikut serta dalam pemilihan nasional. Konstitusi Kuwait tahun 1962, menyatakan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam politik. Namun, undang-undang pemilu yang dikeluarkan pada tahun itu hanya mengizinkan pria yang memiliki suara. Hal ini membuat malu banyak warga Kuwait yang menganggap diri mereka sebagai perintis perjuangan bagi hak memilih wakil rakyat. Sejarah demokrasi parlementer dan kepatuhan mereka pada prinsip yang menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan tidak boleh memilih.

Sejak tahun 1960an, Perempuan Kuwait sudah sadar akan pentingnya persamaan hak. Mereka sudah berusaha memperjuangkan hak politiknya. Upaya untuk menempatkan pejabat negara perempuan di negara-negara Teluk lainnya didorong oleh keluarga-keluarga yang berkuasa di negara-negara itu, dan bukan desakan dari rakyat. Namun, di Kuwait keberadaan sistem parlementer berarti para anggota parlemen yang kolot dapat menentang upaya mendorong peran Perempuan dalam pemerintahan.

Tahun 1999, Emir Kuwait Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah, pernah mengajukan dekret yang mendukung kaum perempuan mendapatkan hak

pilih, yang diajukan kerajaan tetapi ditolak oleh Majelis Nasional. Para anggota parlemen dari kalangan Islamis dan kesukuan menolak langkah Emir, karena menurut mereka melanggar tradisi agama Islam dan masyarakat Kuwait. Perjuangan oleh kaum perempuan terus dilakukan semenjak dekrit yang diajukan Emir itu gagal. Enam tahun berselang, ketika tahun 2005 tepatnya tanggal 18 Mei, UU hak politik bagi perempuan disahkan setelah parlemen melaksanakan sidang selama sepuluh jam dengan melakukan voting suara dan hasilnya menunjukkan 35 suara mendukung, 23 menolak, dan 1 abstain. Dewan Legislatif mengesahkan perubahan undang-undang yang diajukan kabinet, meski mendapat perlawanan dari politisi muslim dan suku. Para oponent berpendapat hak-hak politik perempuan bertentangan dengan hukum Islam dan pandangan hidup bangsa Kuwait. Perempuan seharusnya tetap tinggal di rumah dan merawat keluarga. Setelah disahkannya perubahan undang-undang itu, kabinet Kuwait mengangkat Massouma al-Mubarak sebagai Menteri Perencanaan dan Menteri Negara urusan Pembangunan administratif. Perempuan pertama yang menjadi anggota kabinet. Kemenangan ini terasa lebih berarti dan lebih sah di mata rakyat Kuwait karena dicapai lewat perjuangan dari bawah. Kaum perempuan sangat bergembira dan memuji undang-undang yang mengizinkan para perempuan memberikan suaranya dan mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen.

Menjelang pemilu, perempuan banyak melakukan berbagai upaya agar mereka dapat duduk dalam kursi parlemen. Antara lain berusaha

mencari dukungan dari berbagai pihak, seperti aktifis perempuan Shaika Ali J. Al-Sabah seorang putri penguasa kerajaan, pada Festival of Thinkers di Abu Dhabi, dalam pidatonya mengajak seluruh kaum perempuan untuk terus berjuang lebih gigih karena tantangan masa depan lebih besar. Selain itu perempuan Kuwait juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Diantaranya direktur Institut Pembinaan Perempuan Kuwait dan pendapat umum tentang perempuan dan emansipasi. Kemudian Selain itu juga kaum perempuan Kuwait mengadakan kampanye calon legislatif menjelang pemilu. Walaupun banyak pihak yang mendukung para perempuan untuk maju dalam kancah perpolitikan, tetapi mensosialisasikan diri ke masyarakat luas merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh para calon pemimpin perempuan, demi terwujudnya cita-cita bersama kaum perempuan Kuwait.

Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 29 Juni 2006, pemilu Kuwait digelar. Untuk pertama kalinya perempuan Kuwait ikut pemilihan anggota parlemen di negara kaya minyak itu. Pemilu itu dilangsungkan menyusul kampanye cukup panas dipusatkan pada korupsi dan pembaruan sistem pemilihan umum. Menurut daftar Kementerian Dalam Negeri, ada 28 perempuan termasuk di antara 249 calon yang memperebutkan 50 kursi badan legislatif itu. Puluhan perempuan pemilih, yang mewakili 57 % orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih, turut berpartisipasi dalam pemilihan bersejarah di negara kawasan Teluk itu.

Hasil Penghitungan suara pada tanggal 30 Mei 2006, menunjukkan kubu oposisi Kuwait memenangi mayoritas kursi parlemen. Namun, tidak ada seorang pun calon legislatif perempuan yang berhasil menjadi anggota parlemen dalam pemilihan umum historis ini, di mana kaum perempuan untuk pertama kalinya bisa mencalonkan diri. Kubu oposisi, yang merupakan aliansi longgar dari kelompok-kelompok kanan, liberal, dan nasionalis, kini menguasai 33 dari 50 kursi yang ada di parlemen.

Kelompok Muslim Sunni menjadi pemenang utama dalam pemilu tersebut dengan merebut 17 kursi, meningkat dari 14 kursi yang dimiliki dalam parlemen sebelumnya. Kemenangan itu termasuk kemenangan bagi seluruh kelima caleg dari Gerakan Konstitusional Islam, sayap politik kelompok Persaudaraan Islam. Tidak ada seorang perempuan pun yang berhasil terpilih sebagai anggota parlemen dalam pemilu pertama di Kuwait yang diikuti oleh para caleg perempuan. Kekalahan telak yang diterima perempuan Kuwait dengan lapang dada. Walaupun diantara mereka tidak ada satu pun yang terpilih dalam Pemilu 2006 tersebut, mereka tetap berbangga hati karena perjuangan mereka selama kurang lebih 40 tahun ini telah membuahkan hasil. Dengan adanya perubahan UU Pemilu yang memperbolehkan perempuan ikut memilih dan dipilih, maka pada pemilu yang akan datang mereka akan terlibat kembali.

Selain temuan akademik seperti diatas tersebut, kesimpulan lain yang penulis dapatkan dari penyusunan penelitian ini adalah posisi beberapa studi yang selama ini penulis pelajari selama masa perkuliahan di prodi ini. Dalam

penyusunan penelitian ini, peran beberapa studi sangat besar dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.

Sebagai landasan dasar yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini, penulis mendapatkan teori dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional yang membahas mengenai teori-teori yang relevan dan biasa digunakan dalam penelitian berbagai kasus dalam studi hubungan internasional. Masih berkaitan dengan teori, penulis juga banyak mendapatkan pembelajaran dari mata kuliah Teori Perbandingan Politik. Salah satunya penulis dapat mempelajari teori sistem politik dari mata kuliah ini dan kemudian digunakan penulis dalam penelitian ini untuk menganalisa sistem politik negara Kuwait yang sejak tahun 1962, memiliki UU pemilu yang hanya memberikan hak politik bagi kaum pria saja, tetapi akhirnya pada tahun 2005 pemerintah Kuwait memberikan hak politik bagi semua golongan. Selain itu, untuk menentukan batasan dan unit analisa, penulis memanfaatkan pengetahuan Level of Analysis yang didapat dari perkuliahan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, penulis mendapat pengetahuan tentang adanya unit analisa yang berbeda tergantung tingkat analisa dari objek yang diteliti. Mulai dari individu, kelompok, negara bangsa, regional, sampai dengan masalah global.

Mata kuliah lain yang berperan besar dalam penelitian ini adalah Politik dan Pemerintahan Timur Tengah. Dari mata kuliah ini penulis mendapatkan pengetahuan umum dari negara-negara timur-tengah yang

berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu tentang negara Kuwait yang terletak di kawasan timur-tengah. Tentunya negara-negara di kawasan itu saling berpengaruh dari sisi politik, sosial, ekonomi dan budaya. Karena memang memiliki kesamaan sejarah dan fisiografis.

Kesimpulan lain yang dapat penyusun ambil adalah sumbangsih penelitian ini terhadap studi atau praktek dalam ilmu hubungan internasional yang cukup signifikan. Penelitian ini mengupas masalah perempuan Kuwait yang menuntut hak politik yang akhirnya mampu mencapai tujuan-tujuan mereka. Dari penelitian ini dapat dipetik makna, bagi seluruh perempuan di belahan dunia manapun yang apabila sampai saat ini belum memiliki hak politik, maka sudah seharusnya kita dapat menuntut demi tgapnya keadilan dan hak asasi bagi semua golongan. Selain itu, sumbangsih terhadap praktek politik sudah sangat jelas ditekankan dalam penelitian ini. Bahwa politik tidak hanya untuk kaum laki-laki saja yang boleh memilih dan dipilih dalam kegiatan politik. Politik bagi semua golongan. Begitulah adanya, kalau memang kita menginginkan berdirinya sebuah negara demokrasi yang menganut asas keadilan.

Masih diperlukan banyak diskusi dan praktek yang nyata untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan. Perjalanan perjuangan ini juga mengajak perempuan untuk dapat saling mendukung mewujudkan keadilan yang diinginkan. Dukungan dari sesama kaum tidak akan cukup tanpa kesadaran yang tinggi dari kedua gender bahwa ada rantai keterkaitan yang cukup erat diantara keduanya. Banyak hal yang dapat saling dipelajari oleh perempuan dan laki-laki dalam bidang politik.